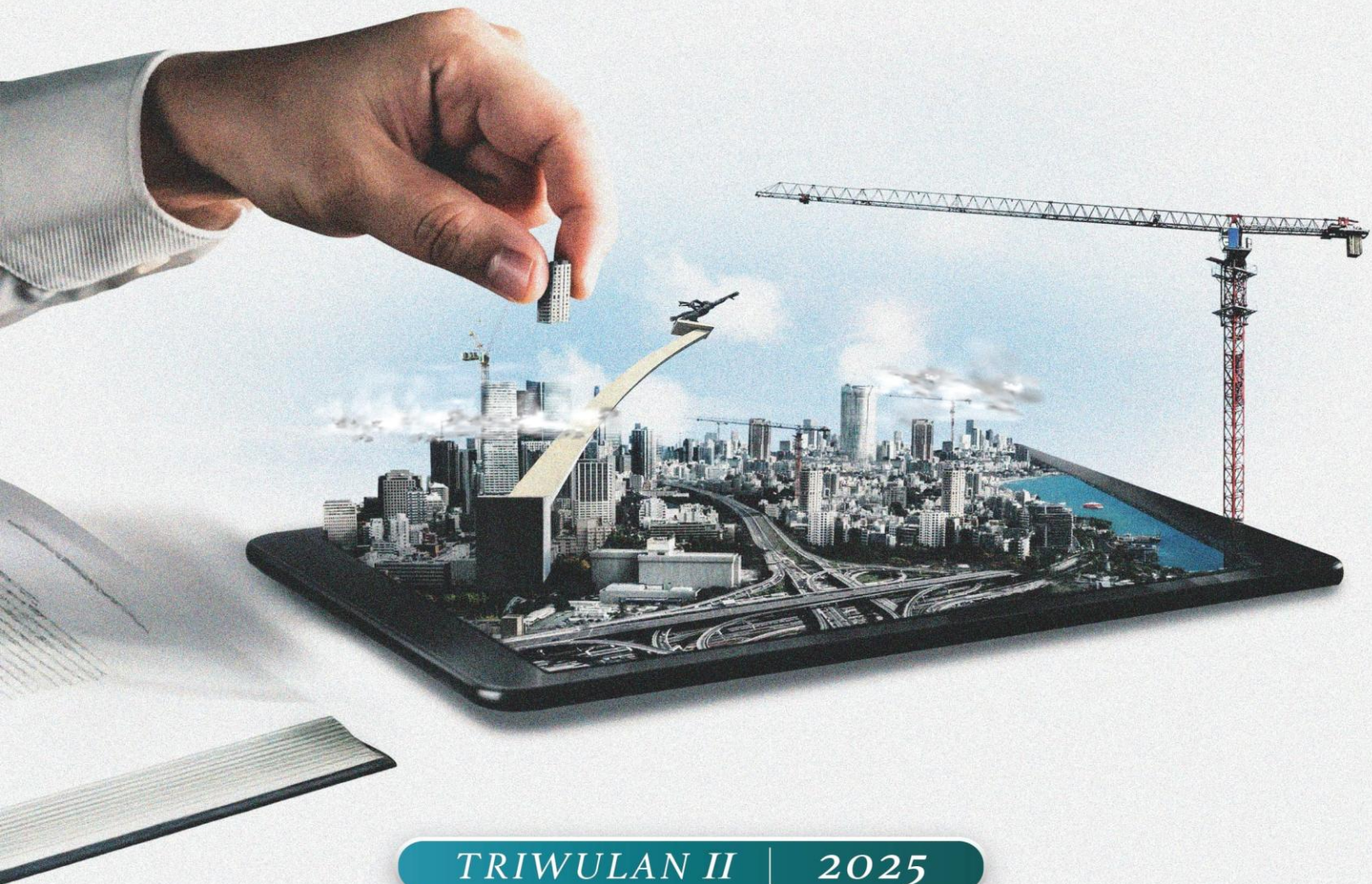




# LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



*TRIWULAN II | 2025*

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



## **KATA PENGANTAR**



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi

Darat Kelas II Bali yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta revisinya. Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Badung, 18 Juli 2025

Kepala Balai,



Dr. I Made Suraharta, S.T., S.SiT., M.T., IPM.

NIP. 19710418 199803 1 011

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024 - 2029 mengusung Visi “Bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Dalam mendukung visi Presiden RI, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebagai salah satu unit kerja Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1);
2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2);
3. KP – Konektivitas Laut (PP 2);
4. KP – Konektivitas Udara (PP 2);
5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan
6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025-2029, yang telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran kegiatan tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025, ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan (SK) dan 40 (Empat Puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja pada triwulan kedua tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai

Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali masuk kategori baik. Hal tersebut terlihat dari 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan (SK) yang telah ditetapkan telah mencapai > 62,57% di Triwulan II Tahun 2025. Dari 40 (empat puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025, terdapat 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan rata-rata nilainya 100% dan 17 (Tujuh Belas) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ( $0\% \leq \text{IKK} < 100\%$ ) karena pencapaiannya tidak sesuai dengan target triwulanan atau ditargetkan pada triwulan berikutnya. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Terealisasi untuk 5 Trayek dalam setahun (Target 5 trayek);
2. Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe-A terealisasi 3 Kegiatan (Target 6 kegiatan);
3. Jumlah Terminal Tipe-A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 1 Unit (Target 1 unit);
4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan Beroperasi untuk mendukung konektivitas Terealisasi Sebesar 5 Unit (Target 5 unit);
5. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 trayek);
6. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 3 Unit (Target 3 unit);
7. Jumlah Terminal Tipe-A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terealisasi Sebesar 1 Unit (Target 1 unit);
8. Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe-A sesuai SPM Terealisasi Sebesar 1 Unit (Target 1 unit);
9. Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terealisasi Sebesar 1 Lokasi (Target 1 lokasi);
10. Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Terealisasi Sebesar 1 Tahun (Target 1 tahun);
11. Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
12. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
13. Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
14. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebesar 2 Unit (Target 2 Unit);
15. Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebesar 2 Lokasi / Tahun (Target 2 lokasi / Tahun);
16. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (Target 3 unit);
17. Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebesar 3 Unit (Target 3 unit);
18. Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 unit);
19. Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 3 kegiatan);

20. Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
21. Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan terealisasi sebesar 1 Lokasi (Target 1 lokasi);
22. Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
23. Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
24. Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
25. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
26. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman dilaksanakan pada Semester II (Target 6 kegiatan dari bulan Juli sampai dengan Desember);
27. Jumlah Kegiatan terkait Uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebesar 5 Kegiatan pada Semester I dan dilanjutkan sampai dengan Semester II (Target 10 kegiatan);
28. Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis dilaksanakan pada Semester II (Target 10 unit);
29. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat teralisasi sebesar 2 Kegiatan (Target 4 kegiatan);
30. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 Dokumen);
31. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 2 Kegiatan (Target 2 kegiatan);
32. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 2 kegiatan);
33. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebesar 1 Dokumen (Target 2 dokumen);
34. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Dokumen (Target 1 dokumen);
35. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
36. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
37. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
38. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebesar 2 Kegiatan (Target 2 kegiatan);
39. Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
40. Kegiatan mendukung kebijakan dan reformasi Hukum dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan).



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>I.1 LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>2</b>
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi .....	3
I.2.2 Tugas dan Tanggungjawab Kepala Balai, Seksi - Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan .....	4
<b>I.3 SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	<b>7</b>
<b>I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....</b>	<b>7</b>
I.4.1 Kewenangan.....	7
I.4.2 Sumber Daya Manusia.....	8
I.4.3 Anggaran .....	8
I.4.4 Isu Strategis .....	8
I.4.5 Ruang Lingkup.....	8
<b>I.5 SISTEMATIKA LAPORAN .....</b>	<b>9</b>
<b>I.6 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS .....</b>	<b>19</b>
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 .....	23
I.7 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	23
I.8 URAIAN REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	25
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA .....</b>	<b>31</b>
II. 1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA .....	31
II.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	31
<b>SASARAN KEGIATAN 2 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN .....</b>	<b>39</b>
IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.....	39
<b>SASARAN KEGIATAN 3 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN TRAYEK ANTAR KOTA DENGAN TERMINAL, PUSAT KEGIATAN (KEK, KSN &amp; KI), LINTAS NEGARA, DAN PEDESAAN ANTAR PROVINSI.....</b>	<b>42</b>
IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A .....	42
IKK 3.2 JUMLAH TERMINAL TIPE A YANG DIBANGUN DAN BEROPERASI UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS.....	45
<b>SASARAN KEGIATAN 5 : MENINGKATNYA RASIO KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI ANGKUTAN PENYEBERANGAN .....</b>	<b>48</b>
IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas .....	48
IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.....	52
<b>Sasaran Kegiatan 6: Meningkatkan Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau.....</b>	<b>54</b>
IKK7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas .....	54
<b>Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan .....</b>	<b>58</b>
IKK7.1 Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM.....	59

IKK7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM.....	62
IKK7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM .....	64
IKK7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM.....	67
IKK7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok.....	70
IKK7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus .....	73
IKK7.7 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI .....	76
<b>SASARAN KEGIATAN 8 : MENINGKATNYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI ASDP .....</b>	<b>78</b>
IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	79
IKK8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM .....	82
IKK8.3 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM .....	84
IKK8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan.....	90
<b>SASARAN KEGIATAN 9 : MENINGKATNYA KESELAMATAN ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG .....</b>	<b>93</b>
IKK9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata .....	93
IKK9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang .....	96
IKK9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan .....	99
IKK9.4 Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri .....	102
IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin .....	105
IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan.....	108
IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan .....	110
<b>SASARAN KEGIATAN 10 : MENINGKATNYA KEPATUHAN KENDARAAN BERMOTOR MEMENUHI ACTIVE DAN PASSIVE SAFETY.....</b>	<b>113</b>
IKK 10.1 .... Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman .....	113
IKK 10.2 ..... Jumlah Kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah .....	115
<b>SASARAN KEGIATAN 11 : MENURUNNYA JUMLAH TITIK KONFLIK LALU LINTAS JALAN.....</b>	<b>117</b>
IKK 11.1 ..Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis .....	117
<b>SASARAN KEGIATAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT .....</b>	<b>119</b>
IKK 4.1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat.....	120
IKK 4.2. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat.....	122
IKK 4.3. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan .....	124
IKK 4.4. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat .....	126
IKK 4.5. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan .....	128
IKK 4.6. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat .....	130
IKK 4.7. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat.....	132
IKK 4.8. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) .....	134
IKK 4.9. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	136
IKK 4.10. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja.....	138
IKK 4.11. Kegiatan Mendukung Pembangunan ZI .....	140
IKK 4.12. Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum .....	142
II.3 REALISASI ANGGARAN .....	145

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025.....	145
II.3.2 Realisasi Anggaran.....	151
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	156
II.3.4 Hambatan dan Kendala .....	165
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>166</b>
III.PENUTUP.....	166
III.1 Ringkasan Capaian .....	166
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	168
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>173</b>



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel I. 1</b> Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2025 - 2029 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025.....	20
<b>Tabel I. 2</b> Perjanjian Kinerja Awal Tahunan Tahun 2025 .....	23
<b>Tabel I. 3</b> Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	26
<b>Tabel II. 1</b> Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali IKK lama Tahun 2025 .....	34
<b>Tabel II. 2</b> Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali IKK baru Tahun 2025 .....	38
<b>Tabel II. 3</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi .....	39
<b>Tabel II. 4</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi .....	42
<b>Tabel II. 5</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan .....	48
<b>Tabel II. 6</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau .....	54
<b>Tabel II. 7</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan .....	58
<b>Tabel II. 8</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP.....	78
<b>Tabel II. 9</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang .....	93
<b>Tabel II. 10</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi active dan passive safety .....	113
<b>Tabel II. 11</b> Sasaran Kegiatan Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan .....	117
<b>Tabel II. 12</b> Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat.....	119
<b>Tabel II. 13</b> Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025.....	145
<b>Tabel II. 14</b> Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025.....	145
<b>Tabel II. 15</b> Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2025 .....	145
<b>Tabel II. 16</b> Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan II TA. 2025 .....	145
<b>Tabel II. 17</b> Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025.....	147
<b>Tabel II. 18</b> Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2025.....	147
<b>Tabel II. 19</b> Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2025.....	148
<b>Tabel II. 20</b> Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2025 .....	149
<b>Tabel II. 21</b> Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2025 .....	150
<b>Tabel II. 22</b> Kegiatan Program yang ada dalam DIPA .....	151
<b>Tabel II. 23</b> Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	152
<b>Tabel II. 24</b> Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II 2025 .....	153
<b>Tabel II. 25</b> Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025 .....	154
<b>Tabel II. 26</b> Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 .....	154
<b>Tabel II. 27</b> Rincian sisa Anggaran Tahun 2025 .....	154
<b>Tabel II. 28</b> Efisiensi anggaran .....	156
<b>Tabel II. 29</b> Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) .....	158
<b>Tabel III. 1</b> Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab .....	168

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar I. 1</b> Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat .....	3
<b>Gambar II. 1</b> Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Angkutan Jalan Tahun 2025 .....	40
<b>Gambar II. 2</b> Grafik Capaian IKK Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Tahun 2025.....	43
<b>Gambar II. 3</b> Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025.....	46
<b>Gambar II. 4</b> Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025.....	49
<b>Gambar II. 5</b> Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 .....	52
<b>Gambar II. 6</b> Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi Tahun 2025 .....	55
<b>Gambar II. 7</b> Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025.....	59
<b>Gambar II. 8</b> Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Tahun 2025 .....	62
<b>Gambar II. 9</b> Capaian IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 .....	65
<b>Gambar II. 10</b> Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025.....	68
<b>Gambar II. 11</b> Capaian IKK Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 .....	71
<b>Gambar II. 12</b> Capaian IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus Tahun 2025.....	74
<b>Gambar II. 13</b> Capaian IKK Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI Tahun 2025.....	76
<b>Gambar II. 14</b> Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 .....	80
<b>Gambar II. 15</b> Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025.....	82
<b>Gambar II. 16</b> Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025.....	85
<b>Gambar II. 17</b> Capaian IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025.....	88
<b>Gambar II. 18</b> Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025.....	94
<b>Gambar II. 19</b> Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 .....	97
<b>Gambar II. 20</b> Capaian IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025 .....	100
<b>Gambar II. 21</b> Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025 .....	103
<b>Gambar II. 22</b> Capaian IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Tahun 2025.....	106
<b>Gambar II. 23</b> Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 ..	108
<b>Gambar II. 24</b> Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 .....	111
<b>Gambar II. 25</b> Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025.....	114

<b>Gambar II. 26</b> Capaian IKK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 .....	116
<b>Gambar II. 27</b> Capaian Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis .....	118
<b>Gambar II. 28</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat .....	121
<b>Gambar II. 29</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat .....	123
<b>Gambar II. 30</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan .....	125
<b>Gambar II. 31</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat .....	127
<b>Gambar II. 32</b> Grafik Capaian IKK Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan .....	129
<b>Gambar II. 33</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat .....	131
<b>Gambar II. 34</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) .....	133
<b>Gambar II. 35</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) .....	135
<b>Gambar II. 36</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa .....	137
<b>Gambar II. 37</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja .....	139
<b>Gambar II. 38</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) .....	141
<b>Gambar II. 39</b> Grafik Capaian IKK Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum .....	143
<b>Gambar II. 40</b> Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020– Tahun 2025 .....	150
<b>Gambar II. 41</b> Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2025 .....	153



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dituntut menjadi unit pelaksana yang melakukan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta menyelenggarakan manajemen perencanaan, program, anggaran, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan di satuan pelayanan masing – masing hingga evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Sebagai salah satu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

---

## **I.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Darat No.6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas sebagai berikut :

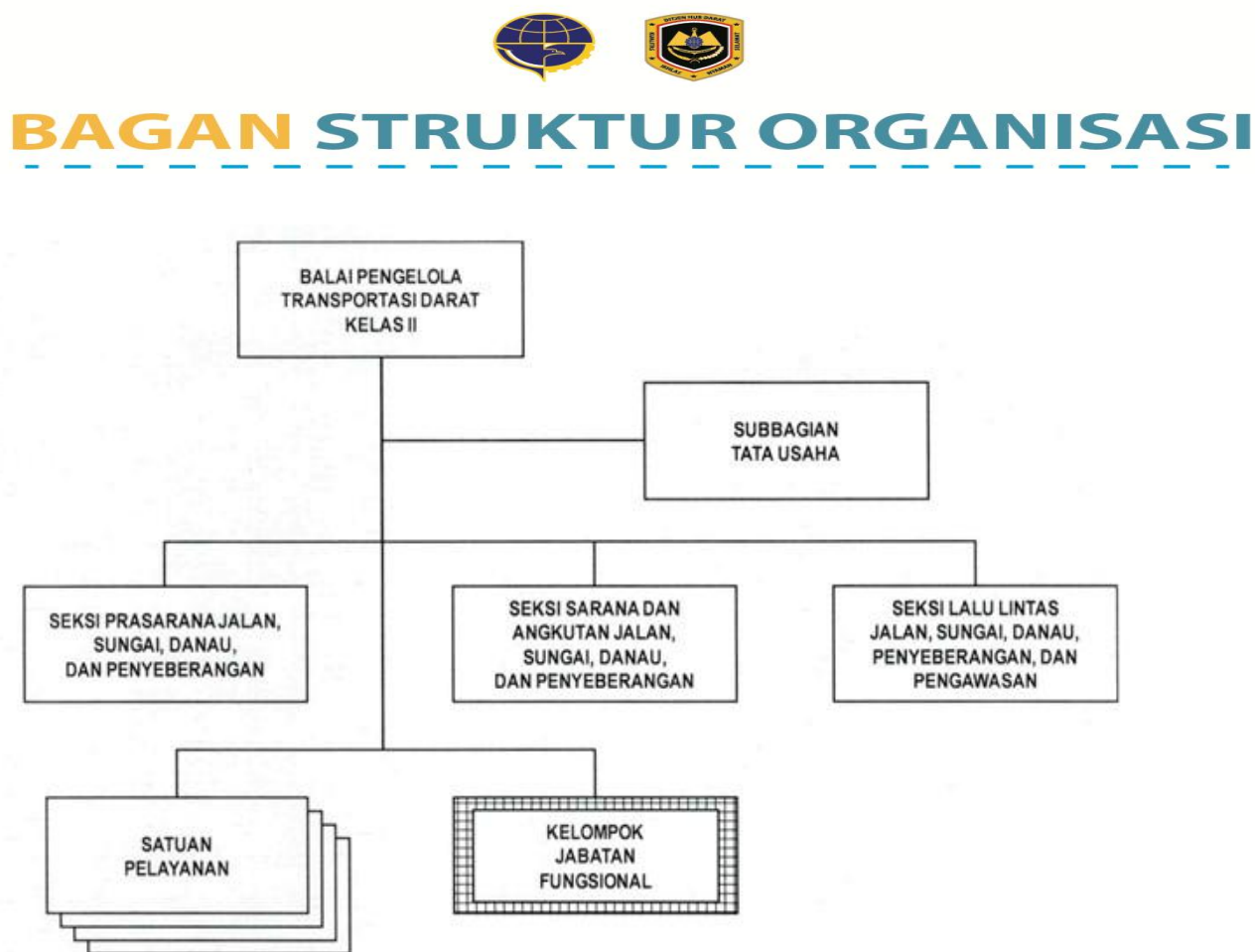
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administrative terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

### I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah sebagai berikut:



**Gambar I. 1** Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali



**I.2.2 Tugas dan Tanggungjawab Kepala Balai, Seksi - Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan**

Adapun tugas Kepala BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
3. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan;
4. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional;
5. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
6. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
7. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
8. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
9. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
10. Melaksanakan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
11. Mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**A. Tugas Kepala Subbag Tata Usaha BPTD Kelas II Bali**

Adapun tugas Kepala Subbag Tata Usaha BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Menyusun bahan rencana, program, dan anggaran;
2. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
3. Menyusun bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
4. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
5. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan;
6. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
7. Menyusun bahan evaluasi dan laporan.

**B. Tugas Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali**

Adapun tugas Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum;
2. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
3. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
4. Melaksanakan bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**C. Tugas Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali**

Adapun tugas Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor;
2. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
3. Melaksanakan analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayanan perintis sungai, danau, dan penyeberangan;

4. Melaksanakan bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**D. Tugas Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan BPTD Kelas II Bali**

Adapun tugas Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan BPTD Kelas II Bali sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau;
2. Menyusun Bahan sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau;
3. Melakukan pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri;
4. Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. Menyelenggarakan pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan;
6. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan;
7. Melaksanakan pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau;
8. Melaksanakan kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
9. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;



10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **E. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **I.3 Sumber Daya Manusia**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali memiliki 278 Pegawai (ASN dan PPNPN) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali	:	81
2. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mengwi	:	77
3. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk	:	34
4. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Padangbai	:	25
5. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Sampalan	:	19
6. Satuan Pelayanan Pelabuhan Danau Bedugul	:	3
7. Satuan Pelayanan Pelabuhan Danau Batur Kedisan	:	2
8. Satuan Pelayanan UPPKB Cekik	:	36
9. Satuan Pelayanan UPPKB Seririt (tidak beroperasi)	:	1

## **I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan**

### **I.4.1 Kewenangan**

#### *a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

#### *b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

#### **I.4.2 Sumber Daya Manusia**

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 1 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi.

#### **I.4.3 Anggaran**

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat.

#### **I.4.4 Isu Strategis**

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB;
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

#### **I.4.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja

## 5. Evaluasi Kinerja

### I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- **Bagan Struktur Organisasi**

I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025**

I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahun 2025

- **Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

I.9 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

#### **BAB II AKUNTABILITAS KINERJA**

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

#### **A. SK2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

##### **A.1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan**

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

#### **B. SK3 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan antar Provinsi**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

##### **B.1. IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe-A**



- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**B.2. IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe-A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**C. SK5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

**C.1. IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**C.2. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP**

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**D. SK6 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

**D.1. IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**E. SK7 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

- E.1. IKK 7.1 Jumlah Terminal Tipe-A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

- E.1.1. Definisi Indikator Kinerja
    - E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
    - E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
    - E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- E.2. IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe-A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

- E.2.1. Definisi Indikator Kinerja
    - E.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
    - E.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
    - E.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- E.3. IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

- E.3.1. Definisi Indikator Kinerja
    - E.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
    - E.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
    - E.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- E.4. IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM**

- E.4.1. Definisi Indikator Kinerja

- E.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**E.5. IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok**

- E.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**E.6. IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus**

- E.6.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**E.7. IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI**

- E.7.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E.7.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.7.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**F. SK8 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

**F.1. IKK 8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

- F.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- F.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- F.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- F.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**F.2. IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM**

- F.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- F.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- F.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- F.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**F.3. IKK 8.3 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

- F.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- F.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- F.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- F.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**F.4. IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM**

- F.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- F.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- F.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- F.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**F.5. IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan**

- F.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- F.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- F.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- F.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**G. SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

**G.1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata**

- G.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- G.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- G.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- G.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**G.2. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang**

- G.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- G.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- G.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- G.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**G.3. IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan**

- G.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- G.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- G.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- G.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**G.4. IKK 9.4 Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri**

- G.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- G.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- G.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- G.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**G.5. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin**

- G.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- G.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- G.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- G.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



**G.6. IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan**

- G.6.1. Definisi Indikator Kinerja
- G.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- G.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- G.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**G.7. IKK 9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

- G.7.1. Definisi Indikator Kinerja
- G.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- G.7.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- G.7.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**H. SK10 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi *active* dan *passive safety***

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

**H.1. IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman**

- H.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- H.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- H.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- H.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**H.2. IKK 10.2 Jumlah Kegiatan terkait uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah**

- H.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- H.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- H.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- H.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**I. SK11 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

**I.1. IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis**

- I.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- I.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- I.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- I.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J. SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat**

- **Uraian Sasaran Kegiatan**

**J.1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat**

- J.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat**

- J.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan**

- J.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat**

- J.4.1. Definisi Indikator Kinerja

- J.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan**

- J.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat**

- J.6.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat**

- J.7.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.7.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.7.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)**

- J.8.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.8.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.8.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.8.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

- J.9.1. Definisi Indikator Kinerja

- J.9.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.9.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.9.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja**

- J.10.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.10.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.10.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.10.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.11. IKK 4.11 Kegiatan mendukung Pembangunan ZI**

- J.11.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.11.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.11.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.11.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**J.12. IKK 4.12 Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi Hukum**

- J.12.1. Definisi Indikator Kinerja
- J.12.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- J.12.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- J.12.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**II.3 Realisasi Anggaran**

**II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025**

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2021 – 2025

#### **II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025**

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

#### **II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **II.3.4. Hambatan dan Kendala**

### **BAB III PENUTUP**

#### **III.1 Penutup**

##### **III.1.1 Ringkasan Capaian**

#### **III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab**

### **Lampiran**

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

## **I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis**

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025-2029 (**Lampiran 1**) merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sesuai



dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel I. 1** Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2025 - 2029 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
-1	-2	-3		-4
<b>GA</b>		<b>PROGRAM INFRASTRUKTUR</b>		
1.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan	IKK2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek
2.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi	IKK3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan
		IKK3.2	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit
3.	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit
		IKK6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trayek
4.	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau	IKK7	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK7.1	Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit
		IKK7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit
		IKK7.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi
		IKK7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Tahun

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
		IKK7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan
		IKK7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan
		IKK7.7	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Kegiatan
6.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP	IKK8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit
		IKK8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Tahun
		IKK8.3	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit
		IKK8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit
		IKK8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Unit
7.	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan
		IKK9.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan
		IKK9.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi
		IKK9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan
		IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRL dan Andalalin	Kegiatan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
		IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan
		IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan
8.	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan
		IKK10.2	Jumlah Kegiatan terkait uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan
9.	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit
<b>WA</b>		<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan
		IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen
		IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan
		IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan
		IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen
		IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen
		IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan
		IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan
		IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
		IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan
		IKK4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan
		IKK4.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi Hukum	Kegiatan

#### **I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025**

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali (**Lampiran 2**) merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan, satuan dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2025. Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, Rencana Kinerja Tahunan awal (RKT) berisi 5 (lima) Sasaran Kegiatan, 12 (Dua belas) indikator kegiatan dan targetnya masing-masing.

#### **I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali (**Lampiran 3**) merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran diawal adalah Rp. 98.687.220.000,- adalah sebagai berikut:

**Tabel I. 2 Perjanjian Kinerja Awal Tahunan Tahun 2025**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
	<b>GA</b>	<b>PROGRAM INFRASTRUKTUR</b>		

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8
2.	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5



NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	200
		IKK3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100
<b>WA</b>		<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95

### **I.8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali **(Lampiran 4)** merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan karena adanya perubahan pimpinan yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran adalah Rp. 98.687.220.000,- adalah sebagai berikut:

**Tabel I. 3** Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
-1	-2	-3		-4	-5
<b>GA</b>		<b>PROGRAM INFRASTRUKTUR</b>			
1.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan	IKK2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5
2.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi	IKK3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	6
		IKK3.2	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
3.	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	5
		IKK6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1
4.	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau	IKK7	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK7.1	Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
		IKK7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	1

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		IKK7.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	1
		IKK7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Tahun	1
		IKK7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1
		IKK7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	1
		IKK7.7	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP	IKK8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2
		IKK8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Tahun	2
		IKK8.3	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	3

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		IKK8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	3
		IKK8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1
7.	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3
		IKK9.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	1
		IKK9.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	1
		IKK9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1
		IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1
		IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1
		IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1
8.	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan	IKK10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik	Kegiatan	6

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
	Bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>		Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman		
		IKK10.2	Jumlah Kegiatan terkait uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	10
9.	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	10
<b>WA</b>		<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4
		IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2
		IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2
		IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kegiatan	1



NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			(LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat		
		IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
		IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2
		IKK4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1
		IKK4.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi Hukum	Kegiatan	1

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA**

#### **II. 1. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

#### **II.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

### **Metode Pengukuran**

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

#### **Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

### **Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2025;
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja ada tahun 2025 dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1		
				T	R	C
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					58,01%
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	32,06	32,06%
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	1	1	1	100%
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	0	0%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	8	8	8	100%
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					102%
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	85	85	90	106%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	75	75	74	98%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					46,5%
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	30	30%
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	5	5	5	100%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	200	200	0	0%
IKK 3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	85	85	56	56%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	100	100%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95	95	95	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						81,30%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						68,50%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						6
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						6

**Tabel II. 1** Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali IKK lama Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2		
				T	R	C	T	R	C
SK2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan					100%			100%
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5	5	5	100%	5	5	100%
SK3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi					50%			75%
IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	6	6	0	0%	6	3	50%
IKK 3.2	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1	1	100%	1	1	100%
SK5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan					50%			50%
IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	5	5	5	100%	5	5	100%
IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	1	0	0%	1	0	0%
SK6	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau					100%			100%
IKK 7	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	3	3	100%	3	3	100%
SK7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan					71,42%			71,42%
IKK 7.1	Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 7.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2		
				T	R	C	T	R	C
IKK 7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 7.7	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%
<b>SK8</b>	<b>Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP</b>					<b>80%</b>			<b>80%</b>
IKK 8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	2	100%	2	2	100%
IKK 8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Tahun	2	2	2	100%	2	2	100%
IKK 8.3	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	3	3	3	100%	3	3	100%
IKK 8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	3	3	3	100%	3	3	100%
IKK 8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	1	0	0%	1	0	0%
<b>SK9</b>	<b>Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang</b>					<b>57,14%</b>			<b>61,85%</b>
IKK9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	3	0	0%	3	1	33%
IKK 9.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%
IKK 9.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%
IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK 9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
<b>SK10</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i></b>					<b>10%</b>			<b>25%</b>



SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2		
				T	R	C	T	R	C
IKK10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	6	6	0	0%	6	0	0%
IKK10.2	Jumlah Kegiatan terkait uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	10	10	2	20%	10	5	50%
<b>SK11</b>	<b>Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan</b>					<b>0%</b>			<b>0%</b>
IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	10	10	0	0%	10	0	0%
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat</b>					<b>35,4%</b>			<b>62,5%</b>
IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	1	25%	4	2	50%
IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	0	0%	1	1	100%
IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	2	1	50%	2	2	100%
IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	2	1	50%	2	1	50%
IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	2	0	0%	2	1	50%
IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	0	0%	1	1	100%
IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%
IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%
IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2	2	100%	2	2	100%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2		
				T	R	C	T	R	C
IKK4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi Hukum	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan</b>						<b>55,39%</b>			<b>62,57%</b>
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</b>						<b>53,62%</b>			<b>64,57%</b>
<b>Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK<math>\geq</math>100%)</b>						<b>20</b>			<b>23</b>
<b>Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%<math>\leq</math>IKK&lt;100%)</b>						<b>20</b>			<b>17</b>

**Tabel II. 2** Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali IKK baru Tahun 2025

Selama tahun 2025, ada 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 40 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

**Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan**

**Tabel II. 3** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5	5

Pencapaian Sasaran Kinerja 2 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

**1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.**

**IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan**

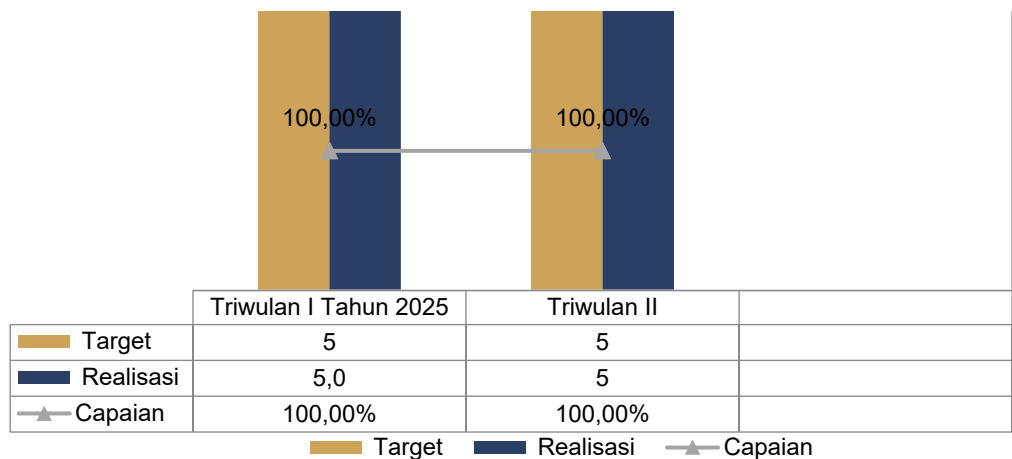
**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan transportasi yang menghubungkan rute-rute yang belum dimasuki oleh angkutan komersil, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali telah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melalui subsidi angkutan perintis melalui Perum DAMRI untuk di Provinsi Bali. Persentase pelaksanaan Keperintisan angkutan jalan dihitung dengan perbandingan pelaksanaan pada tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan.

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Target pada tahun (n)}} \times 100\%$$

**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2025 sebesar 5 Trayek. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 5 Trayek maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 1** Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5958-DRJD Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025 (**Lampiran 5**).

#### **b. Kronologi Target**

Pada tahun 2025 untuk target indikator kinerja program pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 5 Trayek dikarenakan belum adanya peningkatan pada angkutan perintis di BPTD Kelas II Bali.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan antara lain:

1. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
2. Angkutan keperintisan menjadi salah satu transportasi yang murah;
3. Komitmen antara BPTD Bali dengan Pemerintah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan.

#### **d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan antara lain:

1. Kendala dalam mendapatkan BBM bersubsidi karena di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi;

2. Terjadi kenaikan BBM Non-Subsidi sehingga harus dilakukan penyesuaian beberapa komponen agar pelayanan tetap berjalan;
3. Kurangnya informasi atau pengumuman yang tersampaikan ke masyarakat daerah terkait angkutan perintis.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Dalam upaya mewujudkan pencapaian jumlah Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal dengan melakukan monitoring secara langsung dan melibatkan supervisi eksternal dalam pelaksanaannya. Target sejumlah 5 Trayek pada Tahun 2024 sampai dengan akhir periode pelaksanaan telah tercapai. Dari analisa pelaksanaannya, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

---

Dalam memperoleh jumlah Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target pada tahun (n)}} \times 100\%$$

---

Sehingga capaian kinerja persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah :

$$\text{Keperintisan Angkutan Jalan Provinsi Bali} = \frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$$

$$\text{Persentase Keperintisan Angkutan Jalan Provinsi Bali} =$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2025 sebesar Rp. 5.458.756.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 1.549.244.060 atau mencapai 28.38%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Melakukan studi secara matang akan kebutuhan dan rasio keperintisan angkutan jalan untuk wilayah Provinsi Bali;
2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keperintisan angkutan jalan;
3. Terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.

**Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi**

**Tabel II. 4** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	6	3
2.	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- 1. IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A**
- 2. IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

**IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

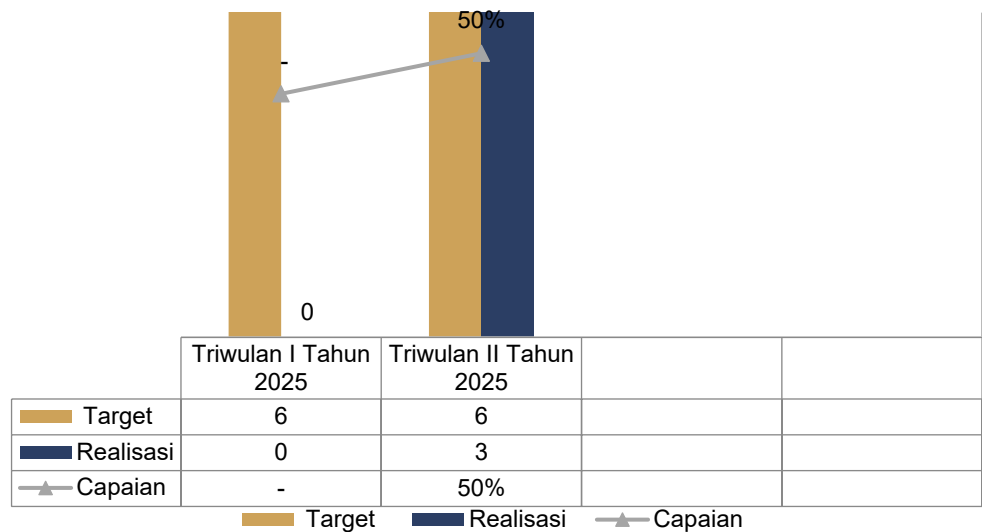
Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan yang sistematis untuk melakukan pengawasan, penilaian, dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) yang beroperasi di Terminal Tipe A yang merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan secara berkala.

Cara Menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pelaksanaan Monev pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Pelaksanaan Monev pada tahun (n)}} \times 100\%$$

**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darata Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A tahun 2025 berjumlah 3 Kegiatan. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 6 maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 2** Grafik Capaian IKK Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No 6 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (**Lampiran 6**), terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A yang beroperasi pada tahun 2025 yaitu di Terminal tipe-A Mengwi Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A untuk dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan operasional Terminal Tipe-A.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan baik sarana maupun prasarana yang dilakukan secara bertahap. Untuk periode ini pelaksanaa usulan rencana revitalisasi pada Terminal Tipe-A Mengwi Bali.

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A terhadap konektivitas transportasi darat dan



keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 6 Kegiatan sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025 dikarenakan belum adanya pembangunan untuk Terminal Tipe-A baru.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A antara lain :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A antara lain :

1. Masih banyak penumpang yang naik di luar terminal;
2. Masih banyak bis yang menunggu di luar terminal;
3. Masih banyak travel-travel gelap yang mengangkut penumpang di luar terminal.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A berjumlah 0 Kegiatan maka jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 6 atau sama dengan 0%.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan baik sarana maupun prasarana yang dilakukan secara bertahap.

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{3}{6} \times 100 \% \\ &= 50 \%\end{aligned}$$

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Tahun 2025 senilai Rp. 209.175.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 127.222.157 atau mencapai 60.82%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang beberapa langkah yang akan ditempuh, antara lain:

1. Melaksanakan monitoring pada Terminal Tipe-A secara berkala;
2. Meningkatkan seluruh aspek pelayanan pada Terminal Tipe-A;
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh operator Bus AKAP ataupun AKDP agar melakukan aktivitas pemuatan dan penurunan penumpang hanya melalui Terminal.

**IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

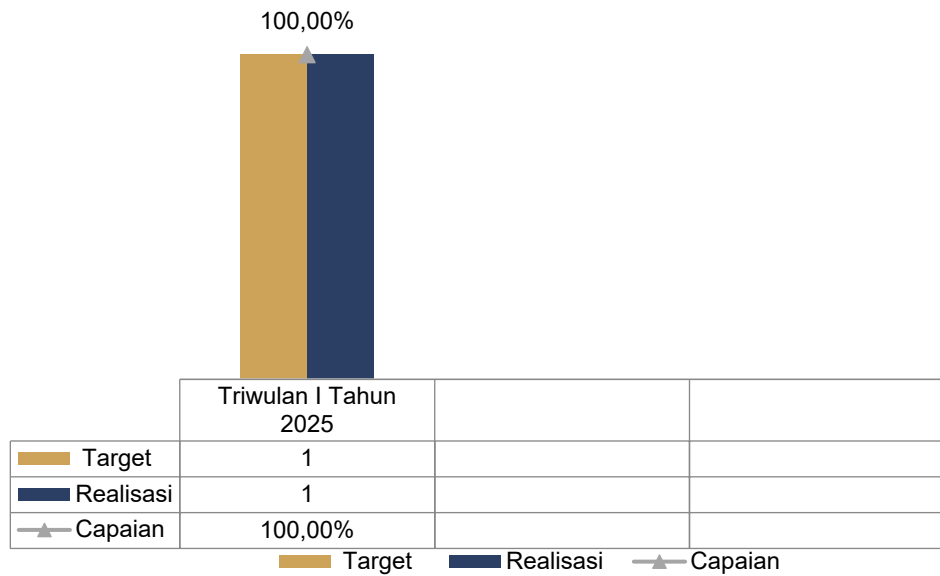
**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah riil Terminal Tipe-A di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Untuk di Provinsi Bali terdapat 1 (satu) Terminal yaitu Terminal Tipe-A Mengwi.  
Cara Menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional Terminal Tipe – A pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional Terminal Tipe – A pada tahun (n)}} \times 100\%$$

**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 3** Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No 1 Tahun 2025 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (**Lampiran 7**), terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A yang beroperasi pada tahun 2025 yaitu di Terminal tipe-A Mengwi Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan operasional di lingkungan Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait operasional Terminal Tipe-A;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasiaonal di Terminal Tipe-A.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan baik sarana maupun prasarana yang dilakukan secara bertahap. Untuk periode ini pengusulan rencana revitalisasi pada Terminal Tipe-A Mengwi Bali.

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas tahun 2025 terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki

target 1 yang Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025 dikarenakan belum adanya pembangunan untuk Terminal Tipe-A baru.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas tahun 2025 antara lain :

1. Pengoperasian dan Manajemen Terminal yang profesional;
2. keterkaitan partisipasi masyarakat dan stakeholder;
3. Monitoring dan Evaluasi berkala pengoperasian Terminal Tipe-A.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap tercapainya indikator Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas tahun 2025 antara lain:

1. Kurangnya dukungan *stakeholder*;
2. Manajemen SDM yang belum memiliki kompetensi terkait Terminal;
3. Terdapat Pengguna jasa layanan yang tidak mendukung proses dan SOP yang tersedia di Terminal Tipe-A.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas tahun 2025 sebesar 1 maka jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan baik sarana maupun prasarana yang dilakukan secara bertahap. Untuk periode ini pengusulan rencana revitalisasi pada Terminal Tipe-A Mengwi Bali.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025 Operasional Terminal Penumpang Tipe A senilai Rp. 5.162.587.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 2.382.221.934 atau mencapai 46,14%.

#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang beberapa langkah yang akan ditempuh, antara lain:

1. Revitalisasi Terminal Tipe-A di wilayah Provinsi Bali;
2. Melaksanakan monitoring pada Terminal Tipe-A secara berkala;
3. Meningkatkan seluruh aspek pelayanan pada Terminal Tipe-A;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh operator Bus AKAP ataupun AKDP agar melakukan aktivitas pemuatan dan penurunan penumpang hanya melalui Terminal.

#### **Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan**

**Tabel II. 5** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	5	5
2.	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	0

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- 1. IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**
- 2. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP**

#### **IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

##### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah riil Pelabuhan Penyeberangan di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Untuk di Provinsi Bali terdapat 5 (Lima) Pelabuhan Penyeberangan yaitu: Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Sampalan, Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul, Pelabuhan Penyeberangan Mentigi. Seluruh Pelabuhan Penyeberangan yang berada dibawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

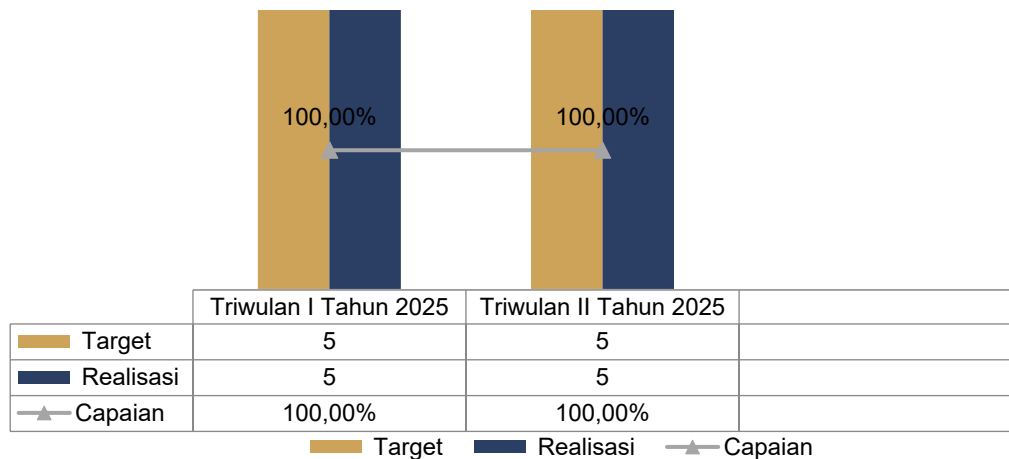
**Catatan** : Pengelolaan yang dimaksud adalah : Pengambil alihan fungsi Kesyahbandaran dan keselamatan Pelabuhan Penyeberangan, pengaturan jadwal kapal, pengawasan manifest dan lashing.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional Pelabuhan Penyeberangan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional Pelabuhan Penyeberangan pada tahun (n)}} \times 100\%$$

#### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi tahun 2025 sebesar 5. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 5 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 4** Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025

#### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

##### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No.1 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (**Lampiran 8**), maka ditetapkan untuk Pelabuhan Penyeberangan dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Jumah pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi pada tahun 2025 di Provinsi Bali terdapat 5 pelabuhan antara lain sebagai berikut :

1. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk
2. Pelabuhan Penyeberangan Padangbai
3. Pelabuhan Penyeberangan Sampalan
4. Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul

5. Pelabuhan Penyeberangan Mentigi

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Kesyahbandaran dan fungsi keselamatan penyeberangan yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di seluruh pelabuhan Penyeberangan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas memiliki target 5 yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025 dikarenakan pelabuhan yang telah beroperasi di BPTD Kelas II Bali hanya 5 Pelabuhan Penyeberangan.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Indikator Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain :

1. Masih Kurangnya SDM yang berkompeten;
2. Keadaan Alam seperti pasang surut air laut yang sering terjadi;
3. Perlunya peningkatan fasilitas kantor.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Beroperasi sebesar 5 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 5 atau sama dengan 100%.

Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi =  $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$



Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Kesyahbandaran dan fungsi keselamatan penyeberangan yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di seluruh pelabuhan SDP di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan jumlah Pelabuhan penyeberangan SDP yang beroperasi Tahun 2025 Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp. 3.758.664.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 1.668.411.829 atau mencapai 44.39%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan:
  - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran;
  - b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penyeberangan;
  - c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;
  - d. Bimbingan Teknis Auditor ISPS Code;
  - e. Bimbingan Teknis Auditor ISM Code;
  - f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLASDP;
  - g. Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah di Bidang SDP.
3. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan.

## IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

### a.1. Definisi Indikator Kinerja

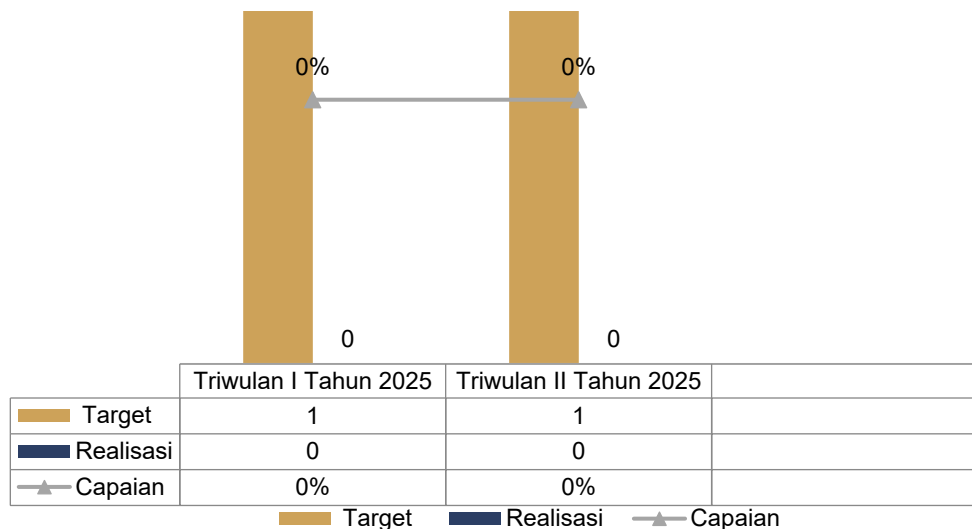
Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan penyeberangan perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Cara Menghitung :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Trayek Keperintisan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Target Trayek Keperintisan Penyeberangan}} \times 100\%$$

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darata Kelas II Bali Tahun 2025

Capaian Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan tahun 2025 sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 Trayek maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 5** Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025

### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No 60 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (**Lampiran 9**).

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Subsidi Transportasi

Angkutan ASDP memiliki target 1 Trayek yang Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP antara lain :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan;
2. Informasi tentang pelayanan di pelabuhan tersampaikan kepada masyarakat;
3. Banyak masyarakat yang menggunakan pelabuhan sebagai tempat perpindahan moda transportasi.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP antara lain :

1. Keterbatasan SDM yang berkompeten di bidang SDP untuk fungsi pengawasan;
2. Usia kapal yang sudah berumur dan tidak layak laut sehingga rawan rusak;
3. Kondisi geografis yang sulit dijangkau atau berisiko tinggi bagi keselamatan pelayaran.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data realisasi untuk IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebesar 0% maka jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 Trayek maka capaian kinerja sama dengan 0%.

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{1} \times 100 \% \\ &= 0 \%\end{aligned}$$

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keberintisan angkutan penyeberangan Tahun 2025 senilai Rp. 6.015.267.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0 atau mencapai 0%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang beberapa langkah yang akan ditempuh, antara lain:

1. Revitalisasi dermaga dan Pelabuhan kecil agar bisa melayani kapal secara lebih efisien dan aman;
2. Pemeliharaan berkala kapal dan fasilitas Pelabuhan agar operasional tidak terganggu;

3. Evaluasi dan pemetaan ulang rute keperintisan berdasarkan kebutuhan Masyarakat, volume penumpang/barang dan potensi ekonomi lokal;
4. Memberikan insentif bagi operator swasta yang ingin terlibat dalam rute keperintisan.

**Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau**

**Tabel II. 6** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	3

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

**1. IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

**IKK7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi adalah jumlah riil Pelabuhan Penyeberangan di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali. Untuk di Provinsi Bali terdapat 3 (Tiga) Pelabuhan Sungai dan Danau yaitu: Pelabuhan Danau Bedugul Tabanan, Pelabuhan Danau Batur Kedisn, Pelabuhan Danau Desa Truyan. Seluruh Pelabuhan Sungai dan Danau yang berada dibawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

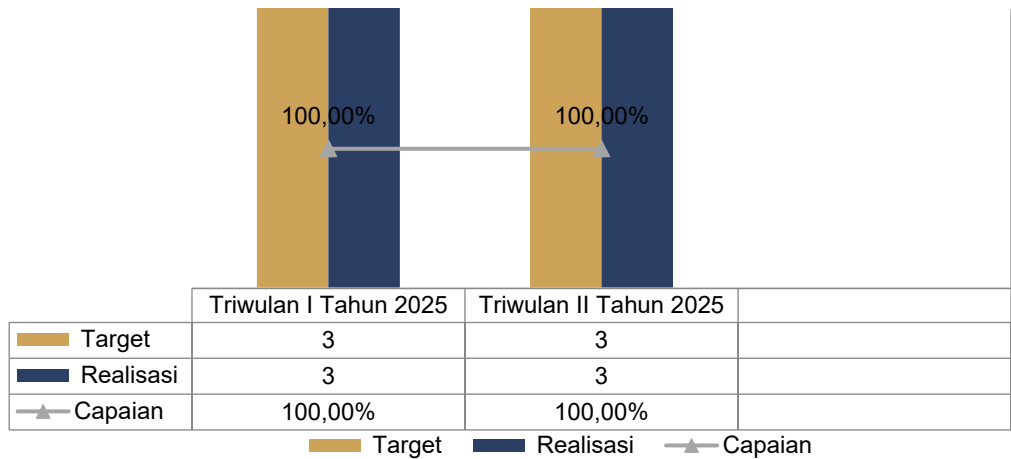
**Catatan** : Pengelolaan yang dimaksud adalah : Pengambil alihan fungsi Kesyahbandaran dan keselamatan Pelabuhan Sungai dan Danau, pengaturan jadwal kapal, pengawasan manifest dan lashing.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau pada tahun (n)}} \times 100\%$$

**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas tahun 2025 sebesar 3. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 6** Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi Tahun 2025

**a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

**a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No.1 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat **(Lampiran 10)**, maka ditetapkan untuk Pelabuhan Sungai dan Danau dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Jumah pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi pada tahun 2025 di Provinsi Bali terdapat 5 pelabuhan antara lain sebagai berikut :

1. Pelabuhan Danau Bedugul Tabann
2. Pelabuhan Danau Batur Kedisan
3. Pelabuhan Danau Desa Truyan

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Kesyahbandaran dan fungsi keselamatan penyeberangan yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat

dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di seluruh pelabuhan Sungai dan Danau di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas memiliki target 3 yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025 dikarenakan pelabuhan yang telah beroperasi di BPTD Kelas II Bali hanya 3 Pelabuhan Sungai dan Danau.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Indikator Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain :

1. Masih Kurangnya SDM yang berkompeten;
2. Keadaan Alam seperti pasang surut air laut yang sering terjadi;
3. Perlunya peningkatan fasilitas kantor.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas sebesar 3 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 3 atau sama dengan 100%.

Jumlah Pelabuhan SD yang beroperasi =  $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Kesyahbandaran dan fungsi keselamatan penyeberangan yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di seluruh pelabuhan Sungai dan Danau di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi Tahun 2025 Operasional Pelabuhan Sungai, Danau senilai Rp. 666.207.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 85.847.720 atau mencapai 12,89%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Sungai dan Danau;
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan Sungai dan Danau:
  - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran;
  - b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;
  - c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;
  - d. Bimbingan Teknis Auditor ISPS Code;
  - e. Bimbingan Teknis Auditor ISM Code;
  - f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLASDP;
  - g. Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah di Bidang SDP.
3. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan.



**Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan**

**Tabel II. 7** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1
2.	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	1	1
3.	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	1	1
4.	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Tahun	1	1
5.	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1	0
6.	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	1	1
7.	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Kegiatan	1	1

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 diukur melalui 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- 1. IKK 7.1 Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**
- 2. IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM**
- 3. IKK 7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**
- 4. IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM**
- 5. IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok**
- 6. IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus**
- 7. IKK 7.7 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI**

## **IKK7.1 Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

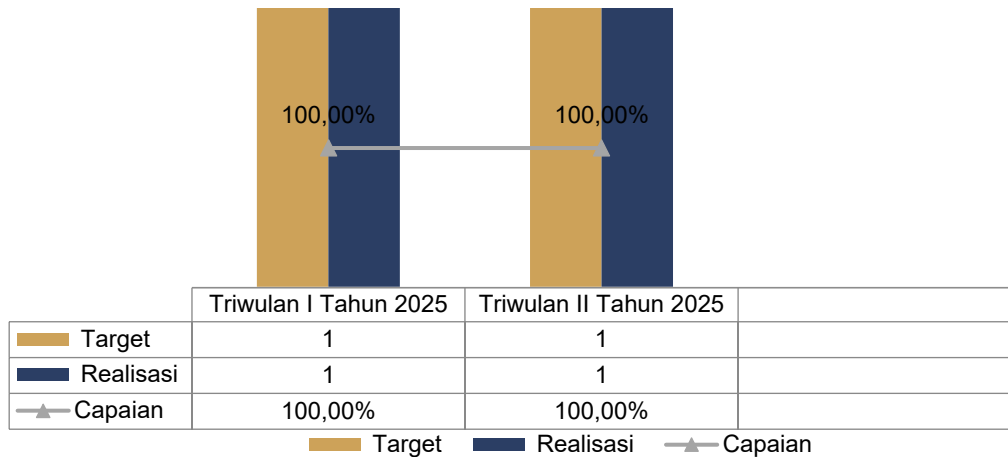
Jumlah Terminal Tipe A yang telah mengalami peningkatan standar pelayanan agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai bagian dari Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi darat. Untuk di Provinsi Bali terdapat 1 (Satu) Terminal Tipe A yaitu: Terminal Tipe A Mengwi. Seluruh Terminal Tipe A yang berada dibawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi TTA yang sesuai SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target TTA yang sesuai SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 7** Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

dalam Trayek, menetapkan SPM yang wajib di penuhi oleh operator dan penyelenggara terminal untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan Petugas yang berkompeten dalam menunjang penignkatan SPM yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM berjalan dengan baik. **(Lampiran 11)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM memiliki target 1 yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025 dikarenakan Terminal Tipe A yang telah beroperasi di BPTD Kelas II Bali hanya 1 Terminal Tipe A.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Indikator Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain :

1. Masih Kurangnya SDM yang berkompeten;
2. Mensupport pelayanan Operasional Terminal Tipe A;
3. Perlunya peningkatan fasilitas kantor baik sarana dan prasarana yang menunjang SPM di Terminal Tipe A.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan Petugas yang berkompeten dalam menunjang peningkatan SPM yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 senilai Rp. 5.162.587.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 2.382.221.934 atau mencapai 46.14%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Terminal Tipe A secara berkala terhadap Standar Pelayanan Minimal ( SPM);
2. Peningkatan Kapasitas SDM;
3. Publikasi dan Promosi Terminal yang sudah meningkat
4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan;
5. Kolaborasi dan Sinergi.

## IKK7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM

### a.1 Definisi Indikator Kinerja

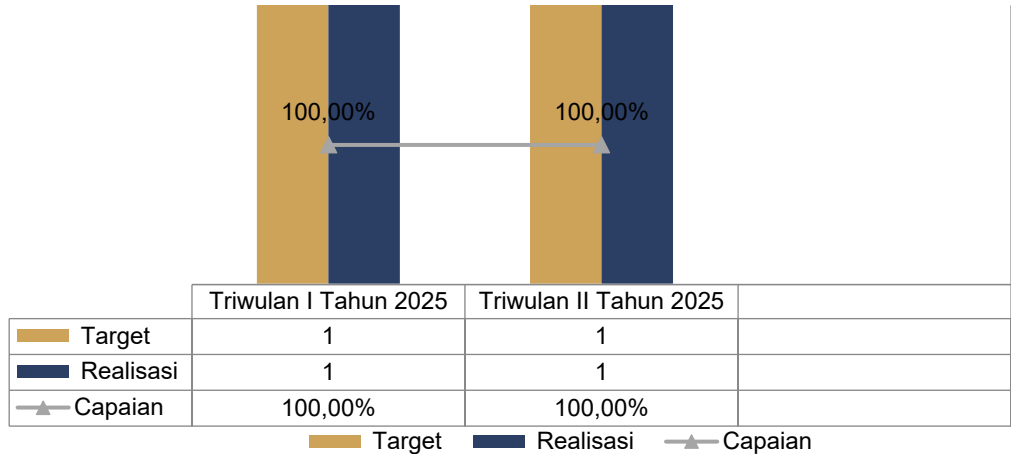
Layanan Operasional Terminal Tipe A merupakan komponen yang menunjang kinerja Satuan Pelayanan di Terminal Tipe A. secara riil jumlah Terminal Tipe A, di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berjumlah 1 (satu). Dan Terminal ini memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi Masyarakat Bali maupun mancanegara yang memerlukan pelayanan jasa di Terminal Tipe A.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional Terminal Tipe A sesuai SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional Operasional Terminal Tipe A sesuai SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025

Capaian Jumlah Operasional Layanan yang beroperasi tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 8** Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No.1 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat **(Lampiran 12)**, maka ditetapkan untuk Terminal Tipe A dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Jumah Terminal Tipe A yang beroperasi pada tahun 2025 di Provinsi Bali terdapat

1 Terminal antara lain sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A Mengwi

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Terminal Tipe A yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di Terminal Tipe A di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM memiliki target 1 yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025 dikarenakan terminal yang telah beroperasi di BPTD Kelas II Bali hanya 1 Terminal Tipe A.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Indikator Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain :

1. Masih Kurangnya SDM yang berkompeten;
2. Mensupport pelayanan Operasional Terminal Tipe A;
3. Perlunya peningkatan fasilitas kantor.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Terminal Tipe A yang Beroperasi sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi =  $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Terminal Tipe A yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan operasional di Terminal Tipe A di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi Tahun 2025 Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp. 5.162.587.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 2.382.221.934 atau mencapai 46.14%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Terminal Tipe A;
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan darat:
  - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas;
  - b. Bimbingan Teknis Tata Cara Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor;
  - c. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Transportasi Darat;

**IKK7.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

jumlah unit fasilitas penimbangan kendaraan bermotor (jembatan timbang) yang telah dilakukan peningkatan layanan secara teknis dan administratif dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendukung ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, menjaga kondisi jalan dari kerusakan akibat over dimension and

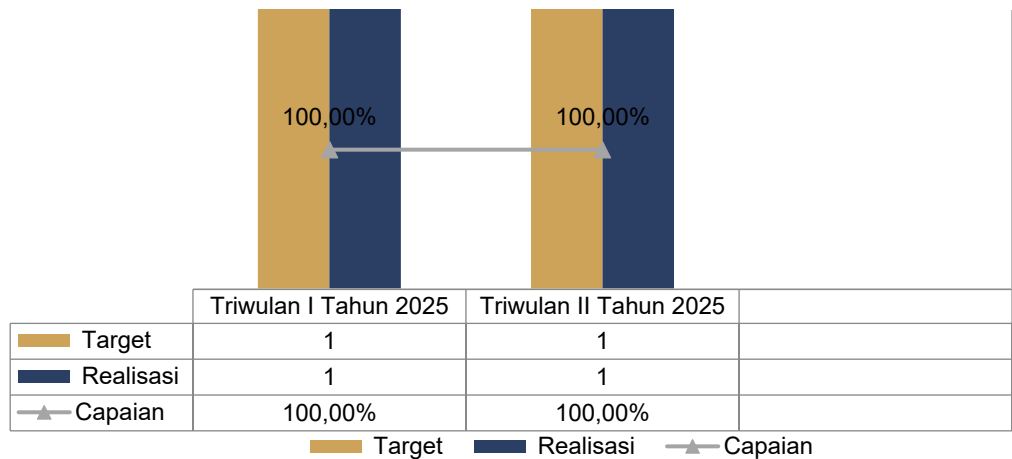
over loading (ODOL), serta memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas sesuai SPM.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Fasilitas UPPKB sesuai SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Fasilitas UPPKB sesuai SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 9** Capaian IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

maka ditetapkan untuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Jumah di Provinsi Bali terdapat 1 UPPKB antara lain sebagai berikut : UPPKB CEKIK.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di



Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 13)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM memiliki target 1 yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025 dikarenakan UPPKB yang telah beroperasi di BPTD Kelas II Bali hanya 1 UPPKB.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Indikator Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain :

1. Masih Kurangnya SDM yang berkompeten;
2. Mensupport pelayanan Operasional Terminal Tipe A;
3. Perlunya peningkatan fasilitas kantor.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi =  $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal

untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan ini di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 senilai Rp. 1.827.898.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp.494.665.137 atau mencapai 27.06%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Modernisasi dna Digitalisasi Layanan
2. Penambahan dan Pemerataan Lokasi Jembatan Timbang
3. Penguatan Regulasi dan Insentif
4. Kolaborasi dengan Pemda dan Swasta
5. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan darat:
  - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas;
  - b. Bimbingan Teknis Tata Cara Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor;
  - c. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Transportasi Darat;

**IKK7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM adalah jumlah unit fasilitas jembatan timbang yang telah beroperasi secara aktif dan berkesinambungan serta melaksanakan layanan penimbangan kendaraan bermotor sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional UPPKB sesuai SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional UPPKB sesuai SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025

Capaian Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 10** Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan maka ditetapkan untuk UPPKB dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Jumah UPPKB yang beroperasi pada tahun 2025 di Provinsi Bali terdapat 1 UPPKB antara lain sebagai berikut : UPPKB CEKIK

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh

pelaksanaannya dan kegiatan Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 14)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM memiliki target 1 yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025 dikarenakan UPPKB yang telah beroperasi di BPTD Kelas II Bali hanya 1 UPPKB.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM antara lain:

1. Ketersediaan Fasilitas yang Memadai
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Kualitas dan Kompetensi SDM
4. Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi
5. Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Internal

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM antara lain :

1. Tidak Konsistennya Pelaksanaan Pengawasan Internal
2. Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi Aparat Pengawas
3. Rendahnya Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
4. Tidak Terintegrasinya Sistem Pengawasan
5. Tidak Adanya Mekanisme Pengaduan Publik yang Efektif

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan

Kendaraan Bermotor sesuai SPM yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

#### **f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Tahun 2025 senilai Rp. 1.827.898.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 494.665.137 atau mencapai 27.06%.

#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Optimalisasi Operasional Jembatan Timbang
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana
3. Digitalisasi Layanan dan Pelaporan
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala
5. Kerja Sama dan Kolaborasi

### **IKK7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok**

#### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) suatu unit kerja atau organisasi, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja kelembagaan. Yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja layanan, memastikan pelaksanaan tupoksi berjalan sesuai rencana, standar, dan regulasi.

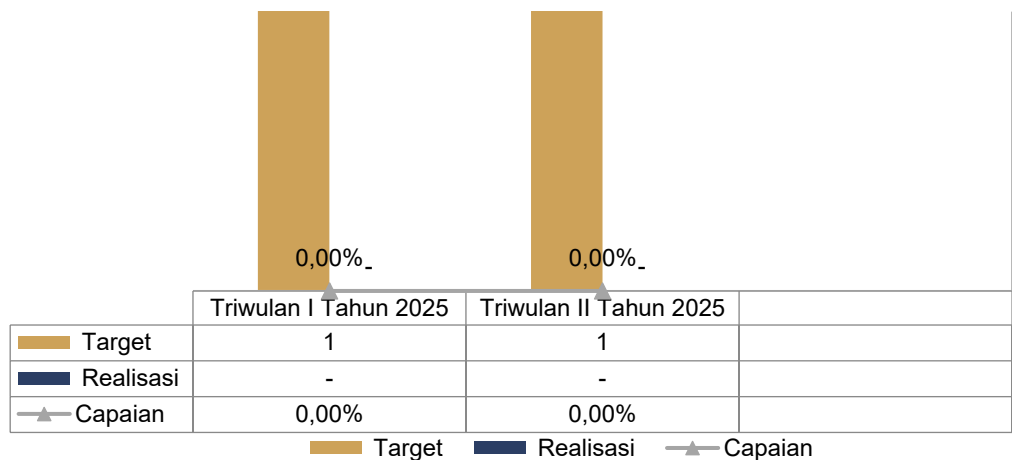
Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Monev Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Monev Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok pada tahun (n)}} \times 100\%$$

#### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025

sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 11** Capaian IKK Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Pengelola Transportasi Darat maka ditetapkan untuk Tugas dan Pokok dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan pokok yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 15)**

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok antara lain:

1. Komitmen dan Dukungan Pimpinan

2. Ketersediaan Instrumen dan Indikator yang Jelas
3. Kapasitas dan Kompetensi Tim Monev
4. Partisipasi Aktif dari Unit Pelaksana Tugas
5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok antara lain :

1. Kurangnya Komitmen dan Dukungan Pimpinan
2. Instrumen dan Indikator yang Tidak Jelas atau Tidak Relevan
3. Data yang Tidak Akurat atau Tidak Lengkap
4. Pelaksanaan Monev Tidak Rutin dan Terjadwal
5. Keterbatasan Sumber Daya (Waktu, SDM, Anggaran)

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan pokok yang saat ini masih dirasa kurang. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 senilai Rp. 261.189.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 169.322.588 atau mencapai 64.83%.

#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Penguatan Komitmen dan Dukungan Pimpinan
2. Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen Monev
3. Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Monev
4. Pengembangan Sistem Informasi dan Digitalisasi
5. Optimalisasi Sumber Daya

#### **IKK7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus**

##### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan pengendalian lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan atau acara khusus yang berdampak pada arus lalu lintas di suatu wilayah. Hal ini menjadi tujuan untuk keberhasilan pengendalian lalu lintas dalam mendukung kelancaran dan keamanan event khusus serta Mendukung keselamatan pengguna jalan dan kelancaran mobilitas selama event.

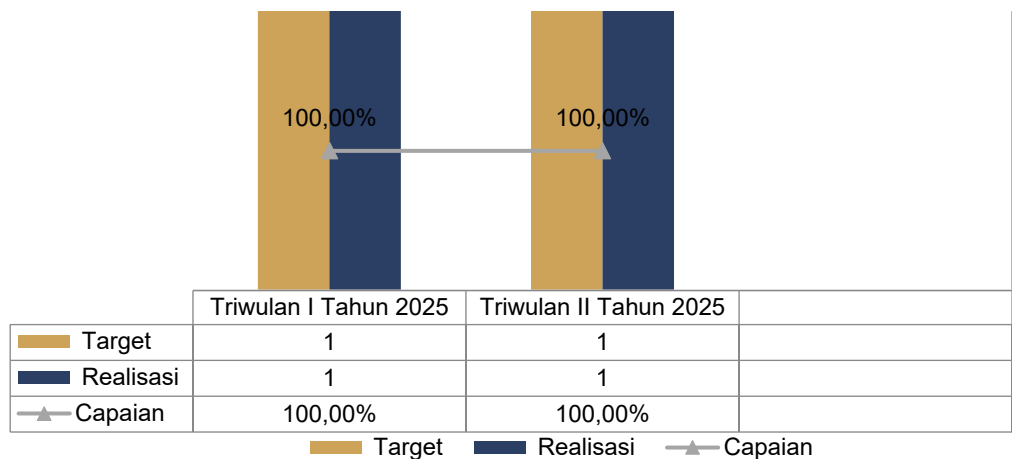
Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Pengendalian Lalu lintas Event Khusus pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Pengendalian Lalu lintas Event Khusus pada tahun (n)}} \times 100\%$$

##### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.





**Gambar II. 12** Capaian IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan Lalu Lintas Khusus untuk Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengaturan lalu lintas dalam kondisi khusus seperti kegiatan besar, darurat, dan event khusus. dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 16)**

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Jumlah Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus antara lain:

1. Perencanaan yang Matang dan Komprehensif
2. Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Peralatan Memadai
4. Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi
5. Evaluasi dan Pembelajaran Pasca Event

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus antara lain :

1. Perencanaan yang Kurang Matang
2. Koordinasi Antar Instansi yang Lemah
3. Kekurangan Personel dan Peralatan
4. Minimnya Informasi dan Sosialisasi ke Masyarakat
5. Tidak Ada Evaluasi dan Pembelajaran Pasca Event

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus Tahun 2025 senilai Rp. 59.647.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 29.341.296 atau mencapai 49.19%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan dan Persiapan yang Lebih Matang
2. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi
3. Peningkatan Fleksibilitas dan Responsivitas Petugas
4. Evaluasi dan Pembelajaran Pasca Event
5. Penguatan Dukungan Kebijakan dan Anggaran

## **IKK7.7 Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI**

### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

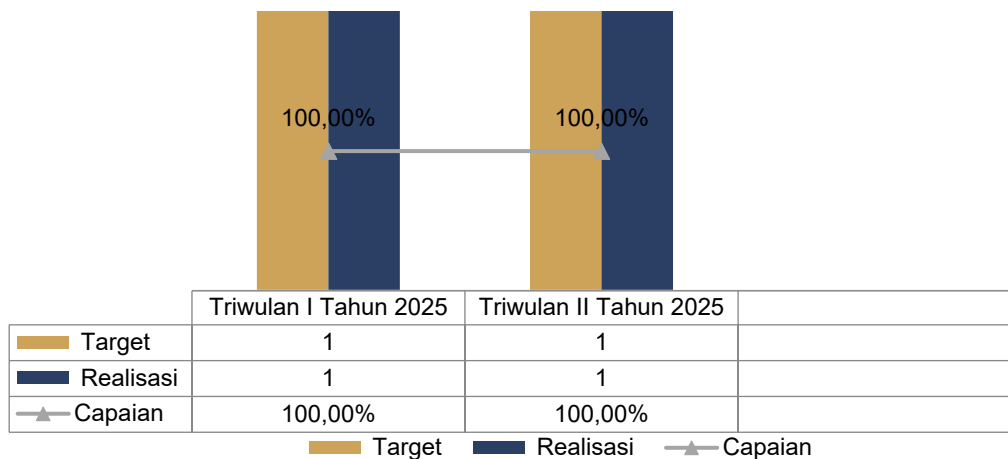
Indikator kinerja Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam proses pembuatan, penyusunan, dan penyempurnaan dokumen teknis yang memuat penjabaran tugas, fungsi, dan tanggung jawab suatu unit kerja atau organisasi, sebagai dasar pelaksanaan operasional dan pengendalian kegiatan.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 13** Capaian IKK Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk Mengatur tata cara penyusunan SOP, yang merupakan bagian dari dokumen teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**(Lampiran 17)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Jumlah Kinerja Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI antara lain:

1. Pemahaman yang Mendalam terhadap Tugas dan Fungsi
2. Ketersediaan Data dan Referensi yang Memadai
3. Tim Penyusun yang Kompeten dan Terkoordinasi
4. Metodologi Penyusunan yang Sistematis
5. Proses Review dan Validasi yang Ketat
6. Integrasi dengan Sistem Manajemen Kinerja dan SOP

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman Tim Penyusun terhadap TUSI
2. Data dan Referensi yang Tidak Memadai atau Usang
3. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi Antar Tim dan Stakeholder
4. Tidak Adanya Proses Review dan Validasi yang Memadai

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI Tahun 2025 senilai Rp. 261.189.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 169.322.588 atau mencapai 64.83%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman Tim Penyusun
2. Penyediaan Data dan Referensi yang Akurat dan Terbaru
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Stakeholder
4. Implementasi Proses Penyusunan yang Sistematis
5. Pengelolaan Waktu yang Efektif
6. Penggunaan Bahasa yang Jelas dan Mudah Dipahami
7. Integrasi dengan Sistem Manajemen Kinerja dan SOP

**Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP**

**Tabel II. 8** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2
2.	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Tahun	2	2
3.	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	3	0

4.	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Tahun	3	3
5.	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	0

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- 1. IKK 8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**
- 2. IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM**
- 3. IKK 8.3 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**
- 4. IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM**
- 5. IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan**

**IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

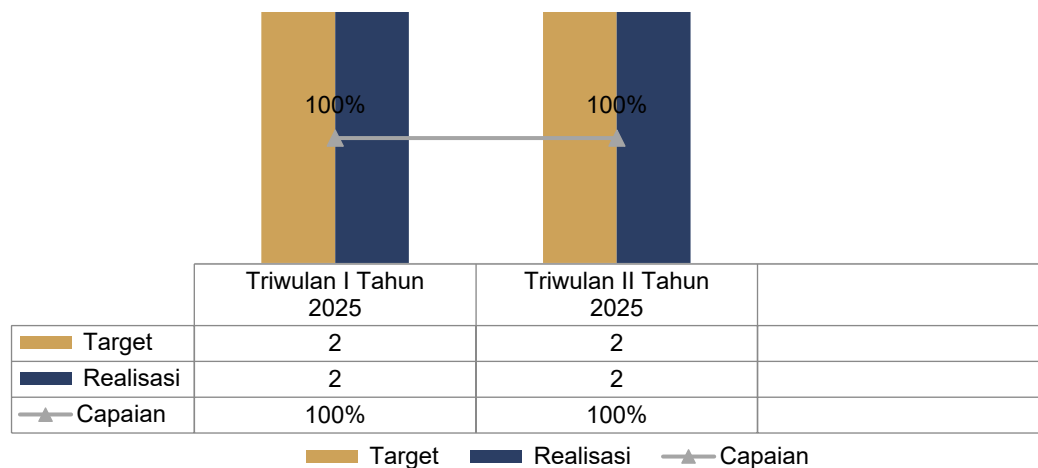
Indikator kinerja ini mengukur jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah mengalami peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh atau bertahap, agar sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari aspek infrastruktur, sarana, SDM, prosedur layanan, maupun kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pelabuhan Penyeberangan untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Pelabuhan Penyeberangan untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 14** Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan untuk regulasi teknis yang secara langsung menetapkan SPM bagi layanan pelabuhan penyeberangan. dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

#### (Lampiran 18)

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM memiliki target 2 Unit yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Jumlah Kinerja Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM antara lain:

1. Komitmen dan Dukungan Pimpinan

2. Perencanaan yang Tepat dan Terpadu
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai SPM
4. Peningkatan Kompetensi SDM
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kinerja Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya
2. Perencanaan yang Tidak Komprehensif
3. Tidak Konsisten terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Berkala
5. Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi Pengguna Jasa
6. Koordinasi Antar Instansi yang Lemah

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 2 maka jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 2 atau sama dengan 100%.

Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 senilai Rp. 1.854.728.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 928.841.047 atau mencapai 50.08%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:



1. Penyusunan Rencana Aksi yang Terarah dan Terukur
2. Penguatan Komitmen Pimpinan dan Stakeholder
3. Pengalokasian Anggaran yang Memadai dan Tepat Sasaran
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pelabuhan
5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala yang Sistematis
7. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

## **IKK8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM**

### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

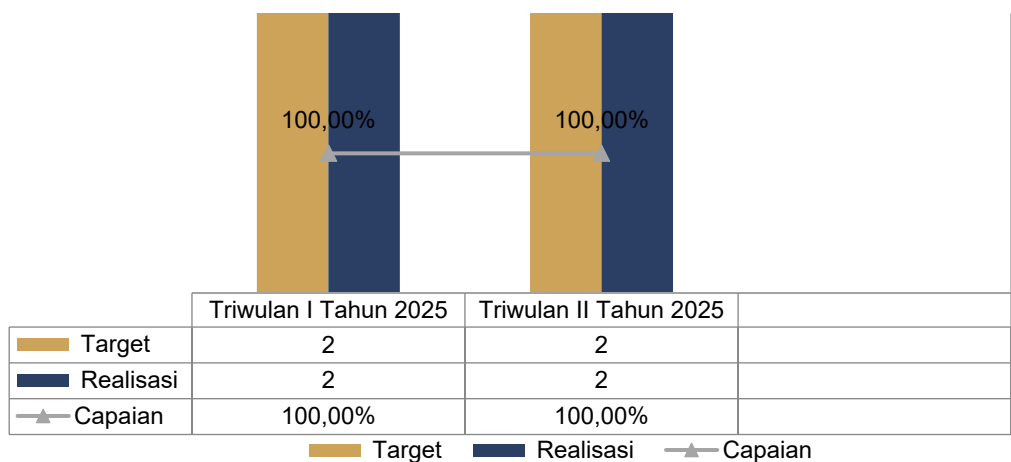
Indikator ini mengukur jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah melaksanakan operasional layanan secara aktif dan konsisten sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus pengukuran meliputi terpenuhinya unsur pelayanan minimum, seperti keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, dan aksesibilitas bagi pengguna jasa.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional Pelabuhan Penyeberangan untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional Pelabuhan Penyeberangan untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM tahun 2025 sebesar 2. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 15** Capaian IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan untuk regulasi teknis yang secara langsung menetapkan SPM bagi layanan pelabuhan penyeberangan. dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 19)**

#### **b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM memiliki target 2 Unit yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Jumlah Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM antara lain:

1. Komitmen Pimpinan dan Pemangku Kepentingan
2. Ketersediaan dan Kelayakan Sarana-Prasarana Pelabuhan
3. Pelayanan Operasional yang Konsisten
4. Kompetensi dan Etika Petugas Layanan
5. Digitalisasi dan Transparansi Layanan

#### **d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM antara lain :

1. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai atau Tidak Fungsional
2. Keterbatasan Anggaran Operasional
3. Kurangnya Kompetensi dan Etika Petugas Layanan
4. Jadwal Operasional Tidak Konsisten
5. Tidak Adanya Sistem Layanan Berbasis Teknologi

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebesar 2 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 2 atau sama dengan 100%.

Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 senilai Rp. 1.854.728.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 928.841.047 atau mencapai 50.08%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Layanan Secara Spesifik
2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Pelabuhan
3. Peningkatan Kompetensi SDM Layanan
4. Penggunaan Teknologi Informasi untuk Layanan Publik
5. Penguatan Anggaran dan Pendanaan Berbasis Prioritas
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala yang Terstruktur

**IKK8.3 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Indikator ini mengukur jumlah pelabuhan sungai dan/atau danau yang telah mengalami peningkatan kualitas pelayanan secara fisik maupun non-fisik, dengan tujuan untuk

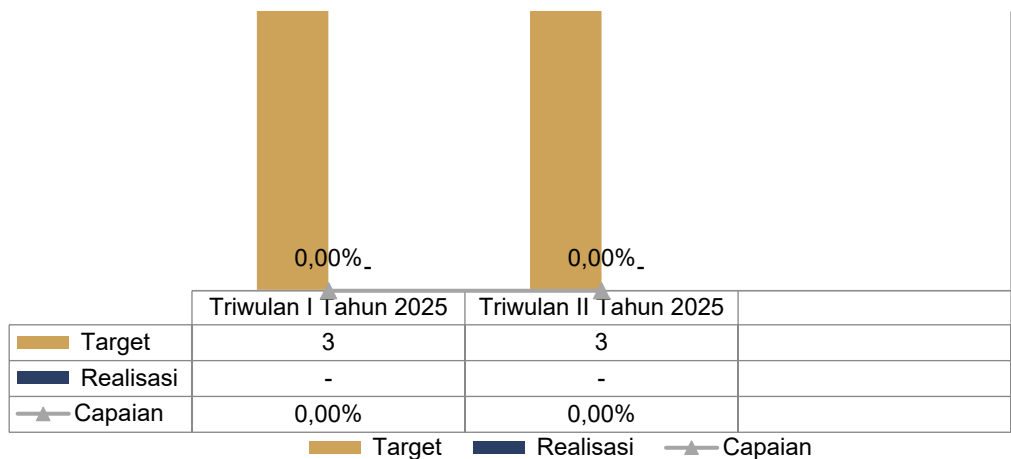
memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor transportasi sungai dan danau sebagaimana diatur oleh regulasi pemerintah.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pelabuhan Sungai dan Danau untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Pelabuhan Sungai dan Danau untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM tahun 2025 sebesar 3. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 16** Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Mengatur teknis operasional dan pelayanan angkutan serta prasarana pendukung di sungai dan danau. dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan

Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**(Lampiran 20)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM memiliki target 3 Unit yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Ketersediaan Anggaran yang Cukup dan Tepat Sasaran
3. Perencanaan dan Pemilihan Lokasi yang Tepat
4. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana
5. Kompetensi dan Sikap Petugas Pelayanan

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pendanaan
2. Perencanaan yang Tidak Berdasarkan Evaluasi Kebutuhan
3. Fasilitas Tidak Memenuhi Unsur SPM
4. Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan
5. Kompetensi SDM dan Pelayanan yang Rendah

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebesar 0 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 3 atau sama dengan 0%.

Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Sungai Danau sesuai SPM

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{3} \times 100\% = 0\%$$

Dalam upaya mewujudkan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pelabuhan Sungai Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Kegiatan Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Tahun 2025 senilai Rp. 666.207.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 85.847.720 atau mencapai 12,89%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Program Prioritas yang Terukur
2. Penguatan Anggaran dan Pendanaan Khusus
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pelabuhan
4. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
5. Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkala

**IKK8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

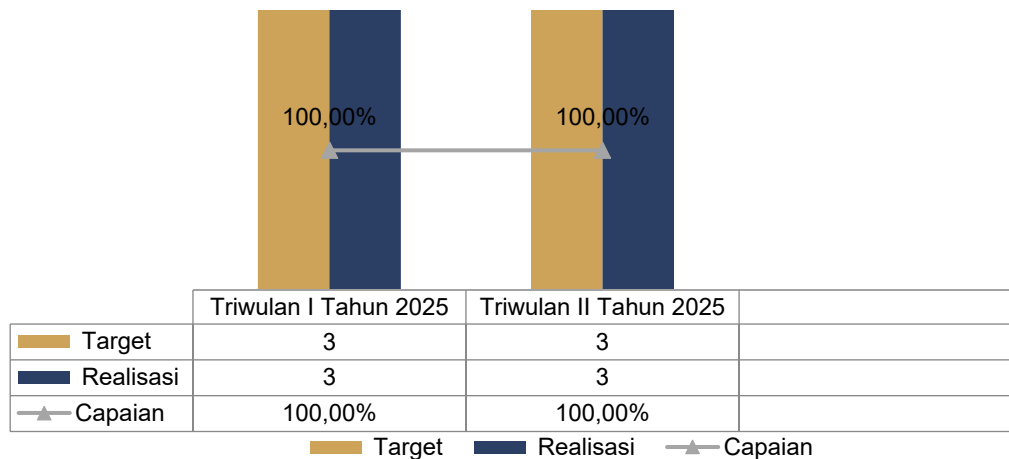
Indikator ini mengukur jumlah atau tingkat pelabuhan sungai dan danau yang telah beroperasi secara aktif dan menyelenggarakan layanan publik sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Indikator ini menilai kinerja pelayanan pelabuhan dari sisi fungsionalitas, kelengkapan fasilitas, tata kelola operasional, dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa transportasi perairan darat (sungai dan danau).

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau untuk memenuhi SPM pada tahun (n)}} \times 100\%$$

**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM tahun 2025 sebesar 3. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 17** Capaian IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025

**a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

**a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Mengatur teknis operasional dan pelayanan angkutan serta prasarana pendukung di sungai dan danau, Menegaskan bahwa pelabuhan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi prinsip pelayanan publik dan keselamatan transportasi dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 21)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM memiliki target 3 Unit yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat

perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Ketersediaan dan Pemanfaatan Anggaran yang Efektif
3. Perencanaan Berbasis Evaluasi dan Data
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai SPM
5. SDM Pelayanan yang Kompeten dan Responsif

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM antara lain :

1. Fasilitas Pelabuhan Tidak Memadai atau Tidak Sesuai SPM
2. Tidak Tersedianya Anggaran Operasional yang Cukup
3. Kurangnya SDM Pelayanan yang Kompeten
4. Tidak Konsistennya Jadwal Operasional
5. Koordinasi Antar Instansi yang Buruk

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM sebesar 3 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 3 atau sama dengan 100%.

Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025 senilai Rp. 666.207.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 85.847.720 atau mencapai 12.89%.



#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Pemetaan dan Evaluasi Rutin terhadap Kondisi Eksisting Pelabuhan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sesuai SPM
3. Penguatan SDM Pelayanan dan Operasional
4. Pengalokasian Anggaran Secara Terarah dan Efisien
5. Digitalisasi Layanan dan Informasi Publik

### **IKK8.6 Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan**

#### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

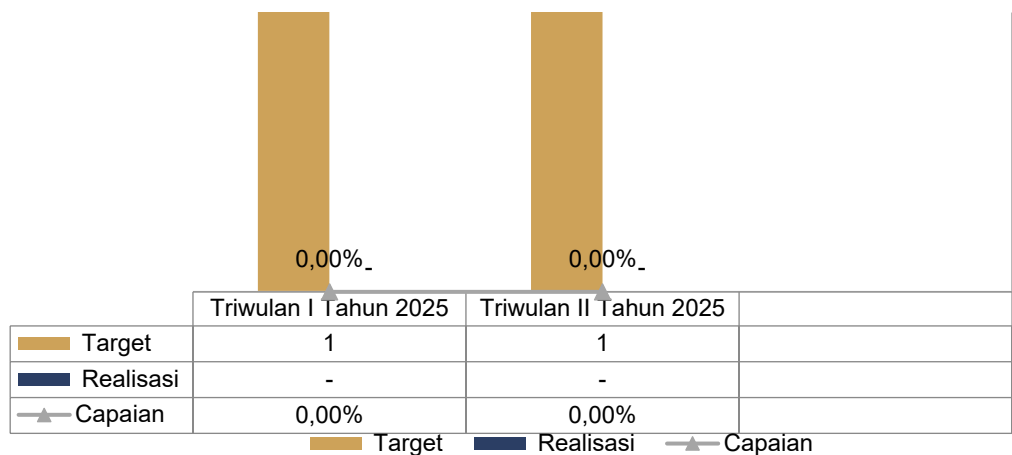
Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP (Ex LPS) di pelabuhan penyeberangan adalah kegiatan yang mencakup seluruh proses pengoperasian, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap fasilitas dan fungsi Organisasi Tata Pelayanan (OTP)—yang sebelumnya dikenal sebagai Layanan Penumpang di Pelabuhan (LPS)—untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan ketertiban pelayanan transportasi penyeberangan di pelabuhan.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP pada tahun (n)}} \times 100\%$$

#### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



Gambar II 1 Capaian IKK Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS)  
di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Mengatur teknis operasional dan pelayanan angkutan serta prasarana pendukung di sungai dan danau, Menegaskan bahwa pelabuhan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi prinsip pelayanan publik dan keselamatan transportasi dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 22)**

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan memiliki target 1 Unit yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Ketersediaan dan Pemanfaatan Anggaran yang Efektif
3. Perencanaan Berbasis Evaluasi dan Data
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai SPM
5. SDM Pelayanan yang Kompeten dan Responsif

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan antara lain :

1. Ketersediaan SDM yang Kompeten dan Terlatih
2. Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung yang Memadai
3. Dukungan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan
4. Implementasi SOP yang Konsisten dan Tegas
5. Pengawasan Internal yang Efektif

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 senilai Rp. 0 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0 atau mencapai 0%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi dan Disiplin SDM OTP

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang OTP
3. Penguatan SOP dan Standarisasi Prosedur Layanan
4. Digitalisasi dan Inovasi Sistem Pengawasan
5. Pengalokasian Anggaran Khusus OTP

**Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang**

**Tabel II. 9** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	1
2.	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	1	0
3.	Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	1	1
4.	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1	0
5.	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	1
6.	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1
7.	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 diukur melalui 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

- 1. IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata**
- 2. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang**
- 3. IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan**
- 4. IKK 9.4 Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri**
- 5. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin**
- 6. IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan**
- 7. IKK 9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

**IKK9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah keseluruhan kegiatan atau tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi berwenang (seperti BPTD, Dinas Perhubungan, atau instansi pengawas

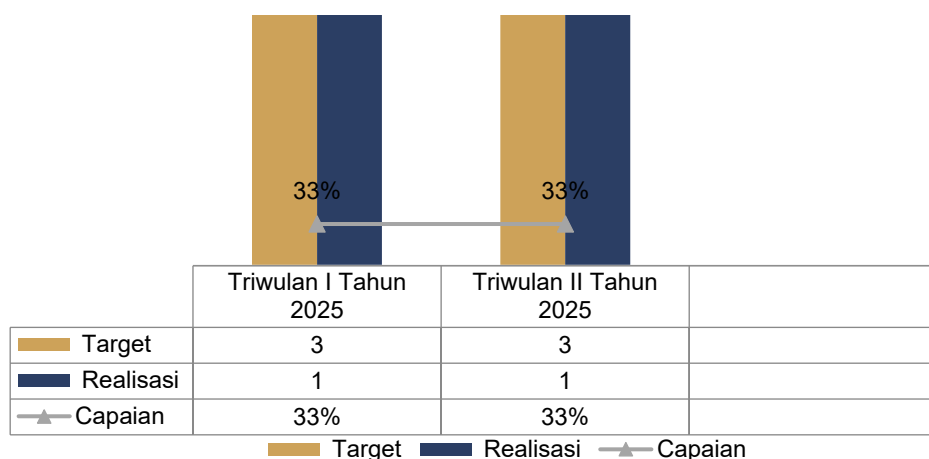
lainnya) dalam rangka memastikan kelancaran, kepatuhan, dan keselamatan operasional angkutan penumpang lintas daerah, Pengawasan terhadap armada bus dan operator yang melayani perjalanan lintas provinsi, mencakup pemeriksaan kelengkapan izin, kelaikan kendaraan, kepatuhan terhadap trayek, dan aspek keselamatan, Pengawasan terhadap layanan angkutan berbasis permintaan (charter/door-to-door) yang melayani rute lintas provinsi, mencakup validasi izin operasional, data penumpang, serta kelengkapan kendaraan, Pengawasan terhadap kendaraan pariwisata yang digunakan untuk kegiatan rekreasi atau turisme, termasuk pemeriksaan izin pariwisata, trayek sesuai peruntukan, serta fasilitas dan keselamatan kendaraan.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata pada tahun (n)}} \times 100\%$$

#### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada dibawah ini.



**Gambar II. 18** Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025

#### **a.2 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

##### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (untuk AKAP dan AJAP). Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (termasuk angkutan pariwisata). Mengatur teknis operasional dan pelayanan angkutan Orang dengan kendaraan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek, yang memenuhi prinsip pelayanan publik dan keselamatan transportasi dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**(Lampiran 23)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata memiliki target 3 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata antara lain:

1. Ketersediaan dan Kompetensi SDM Pengawas
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan
3. Kolaborasi dan Sinergi Antarinstansi
4. Dukungan Sistem Informasi dan Digitalisasi
5. Ketersediaan Anggaran Operasional
6. Perencanaan dan Penjadwalan Kegiatan Pengawasan yang Efektif
7. Dukungan Regulasi yang Tegas dan Jelas

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas
2. Minimnya Anggaran Operasional
3. Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai
4. Perencanaan dan Jadwal Pengawasan yang Tidak Efektif
5. Rendahnya Koordinasi Antarinstansi
6. Regulasi yang Tidak Mendukung atau Tidak Tegas
7. Kurangnya Pelaporan dan Evaluasi

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 3 atau sama dengan 100%.

Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 senilai Rp. 104.730.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 93.169.459 atau mencapai 88.96%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas
2. Optimalisasi Anggaran Pengawasan
3. Peningkatan Sarana dan Teknologi Pengawasan
4. Penguatan Regulasi dan Pedoman Teknis
5. Perencanaan Pengawasan Berbasis Data
6. Edukasi dan Pembinaan kepada Operator
7. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

**IKK9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang adalah ukuran kinerja yang menunjukkan berapa banyak kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh

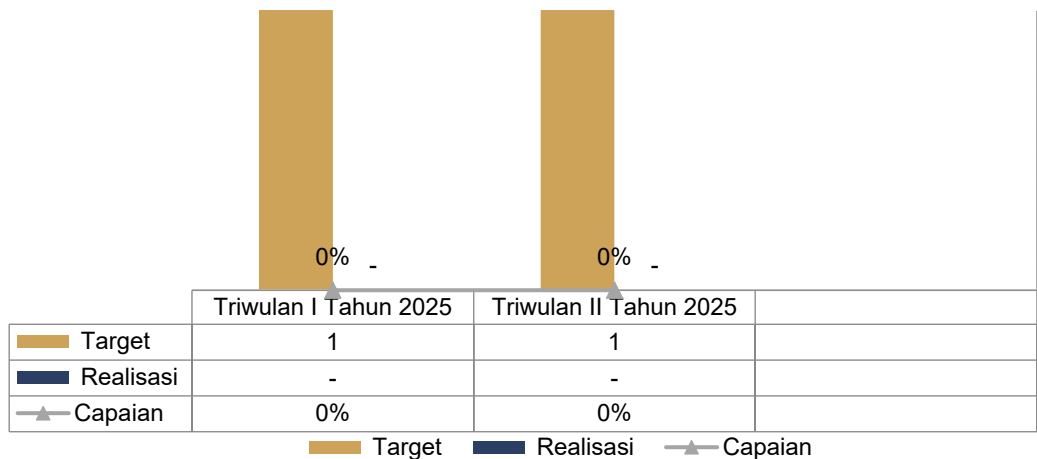
instansi berwenang (seperti BPTD, Dinas Perhubungan, atau Kepolisian) terhadap operasional kendaraan angkutan barang dalam periode waktu tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk Menilai intensitas dan jangkauan pengawasan terhadap aktivitas angkutan barang, Mencegah kerusakan infrastruktur jalan akibat pelanggaran muatan.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025

Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.11**. Grafik Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang



**Gambar II. 19** Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang merupakan dasar teknis untuk pengawasan Over Dimensi Over Loading (ODOL) melalui jembatan timbang. Mencakup ketentuan teknis operasional angkutan barang, termasuk jenis angkutan barang khusus, barang berbahaya, dan tata cara pengangkutan. Mengatur teknis operasional dan pelayanan angkutan barang, yang memenuhi prinsip pelayanan publik dan keselamatan transportasi dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**(Lampiran 24)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang antara lain:

1. Ketersediaan dan Kompetensi SDM Pengawas
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan
3. Perencanaan dan Penjadwalan Pengawasan yang Efektif
4. Sinergi dan Kolaborasi Antarinstansi
5. Dukungan Regulasi yang Jelas dan Tegas
6. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Digital
7. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang antara lain :

1. Keterbatasan SDM Pengawas
2. Minimnya Sarana dan Prasarana
3. Keterbatasan Anggaran
4. Lemahnya Koordinasi Antarinstansi
5. Tidak Adanya Sistem Pelaporan dan Evaluasi yang Baik
6. Gangguan Sosial dan Tekanan dari Pelaku Usaha

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

#### **f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 senilai Rp. 104.730.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 93.169.459 atau mencapai 88.96%.

#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
3. Optimalisasi Anggaran Pengawasan
4. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi
5. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
6. Evaluasi dan Pelaporan Berkala

### **IKK9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan**

#### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan adalah indikator yang mengukur total jumlah fasilitas penimbangan kendaraan (terutama angkutan barang dan angkutan umum) yang telah selesai dibangun dan saat ini berfungsi secara aktif untuk mendukung pengawasan berat muatan kendaraan di jalan. Fasilitas ini berfungsi untuk memastikan kendaraan tidak melebihi batas muatan yang diizinkan, yang sangat penting untuk menjaga keselamatan berkendara, mencegah kerusakan infrastruktur jalan, dan mengurangi risiko

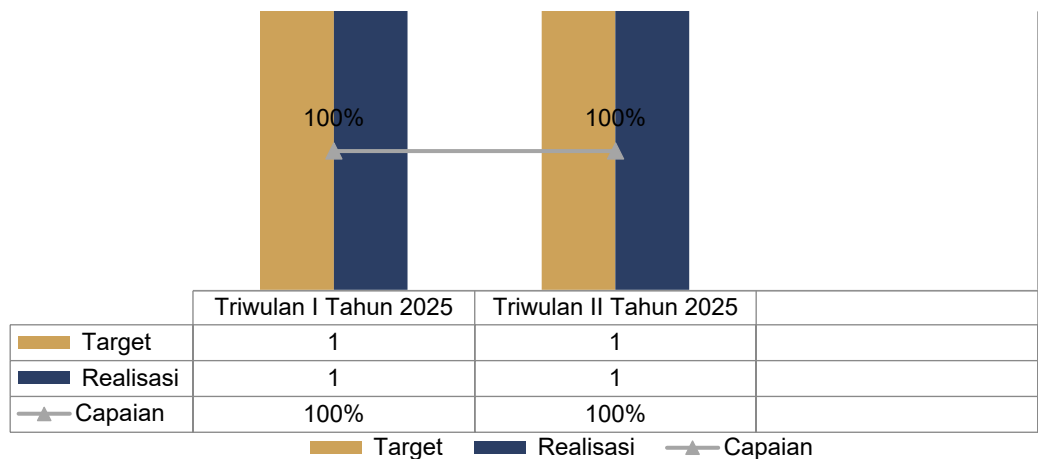
kecelakaan akibat overloading. Mendukung penegakan aturan muatan kendaraan guna meningkatkan keselamatan dan keamanan di jalan.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Fasilitas penimbangan yang di bangun dan dioperasikan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Fasilitas penimbangan yang di bangun dan dioperasikan pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025

Capaian Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 20** Capaian IKK Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang merupakan dasar teknis untuk pengawasan Over Dimensi Over Loading (ODOL) melalui jembatan timbang. Mencakup ketentuan teknis operasional angkutan barang, termasuk jenis angkutan barang khusus, barang berbahaya, dan tata cara pengangkutan. Mengatur teknis operasional dan pelayanan angkutan barang, yang memenuhi prinsip pelayanan publik dan keselamatan transportasi dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 25)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan antara lain:

1. Ketersediaan Anggaran Pembangunan dan Operasional
2. Perencanaan Lokasi yang Tepat dan Strategis
3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten
4. Dukungan Regulasi yang Tegas dan Operasional
5. Komitmen Pimpinan dan Sinergi Antarinstansi
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan antara lain :

1. Perencanaan yang Kurang Tepat
2. Keterbatasan SDM dan Kompetensi Teknis
3. Masalah Teknis dan Kualitas Infrastruktur
4. Lemahnya Koordinasi Antarinstansi
5. Rendahnya Komitmen Pimpinan dan Pemangku Kepentingan
6. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

#### **f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Tahun 2025 senilai Rp. 104.730.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 93.169.459 atau mencapai 88.96%.

### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Optimalisasi Penganggaran dan Sumber Pembiayaan
2. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Operasional
3. Pengembangan SDM Pengelola dan Operator
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala
5. Kolaborasi Lintas Instansi dan Pemda
6. Kampanye Kesadaran dan Edukasi

## **IKK9.4 Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri**

### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri adalah indikator kinerja yang menunjukkan berapa banyak kegiatan pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi berwenang terhadap bengkel karoseri yang melakukan pembuatan atau modifikasi badan kendaraan bermotor, dalam periode waktu tertentu. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mematuhi standar teknis dan spesifikasi keselamatan kendaraan, tidak melakukan modifikasi yang menyebabkan

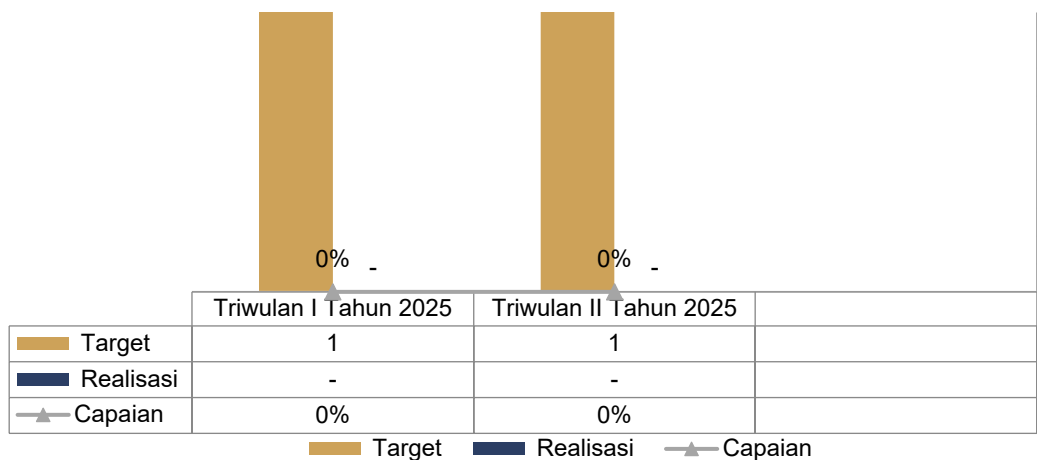
over dimensi atau tidak sesuai peruntukan, mencegah terjadinya Over Dimensi Over Loading (ODOL) akibat karoseri ilegal atau tidak sesuai desain.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 21** Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Mengatur kewajiban uji tipe kendaraan hasil rakitan atau modifikasi, termasuk dari bengkel karoseri, menjadi dasar teknis pengawasan terhadap hasil produksi bengkel sebelum kendaraan digunakan di jalan, yang memenuhi prinsip keselamatan transportasi dibawah Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 26)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri antara lain:

1. Dukungan Regulasi yang Jelas dan Tegas
2. Kerja Sama yang Baik dengan Bengkel Karoseri
3. Perencanaan dan Jadwal Pengawasan yang Terstruktur
4. Sistem Dokumentasi dan Pelaporan yang Efisien
5. Sinergi Antarinstansi
6. Dukungan Sosialisasi dan Pembinaan

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri antara lain :

1. Lemahnya Regulasi Teknis di Lapangan
2. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi
3. Tidak Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
4. Adanya Bengkel Karoseri Tidak Terdaftar atau Ilegal
5. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Pihak Bengkel

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025 senilai Rp. 104.730.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 93.169.459 atau mencapai 88.96%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana dan Jadwal Pengawasan Tahunan
2. Penguatan Kapasitas dan Jumlah SDM Pengawas
3. Pengembangan Sistem Pendataan Bengkel Karoseri
4. Penyusunan SOP dan Standar Teknis Pengawasan
5. Pembinaan dan Sosialisasi kepada Bengkel Karoseri
6. Monitoring dan Evaluasi Rutin

**IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Pengawasan dan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian yang dilakukan oleh instansi berwenang terhadap pelaksanaan. Memastikan rencana dan implementasi MRLL berjalan sesuai standar teknis dan tujuan keselamatan/keteraturan lalu lintas, menilai apakah hasil kajian Andalalin benar-benar diterapkan oleh pengembang/pemilik proyek, mengidentifikasi dampak negatif terhadap lalu lintas dan mencari solusi teknis pengendaliannya.

Cara menghitung :

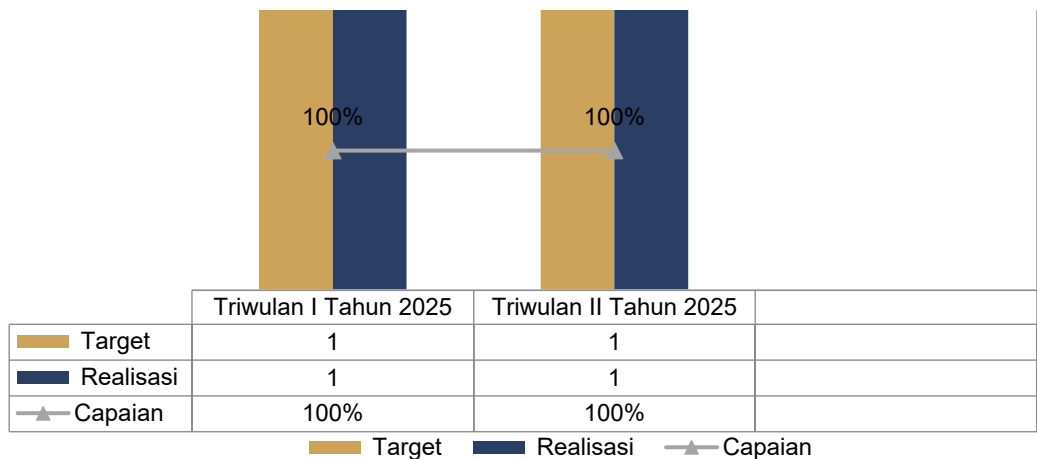
$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin pada tahun (n)}} \times 100\%$$

**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai



100%. Pencapaian ini digambarkan grafik dibawah ini.



**Gambar II. 22** Capaian IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Mengatur tentang pengawasan dan evaluasi penerapan rekomendasi Andalalin, termasuk penindakan terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian implementasi. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, menjadi acuan teknis pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program MRLL, baik yang bersifat permanen maupun temporer.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 27)**

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan Jumlah Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin antara lain:

1. Ketersediaan Regulasi yang Jelas dan Ditegakkan
2. Pemetaan Lokasi dan Aktivitas Karoseri secara Akurat
3. Keterlibatan Instansi Terkait Secara Aktif
4. Kompetensi Tim Pengawas
5. Ketersediaan Dokumen Andalalin yang Akurat dan Diterapkan
6. Komitmen Pimpinan dan Pemilik Usaha
7. Sosialisasi dan Edukasi

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin antara lain :

1. Tidak Dilakukannya atau Tidak Tersedianya Dokumen Andalalin
2. Lemahnya Pengawasan Lapangan
3. Minimnya Koordinasi Antarinstansi
4. Kurangnya SDM yang Kompeten
5. Tidak Ada Sistem Tindak Lanjut
6. Rendahnya Kepatuhan dan Komitmen dari Pemilik Usaha
7. Celah Regulasi atau Ketidaktegasan Penerapan

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$
$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri Tahun 2025 senilai Rp. 104.730.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 93.169.459 atau mencapai 88.96%.

#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana dan Jadwal Pengawasan Tahunan
2. Penguatan Kapasitas dan Jumlah SDM Pengawas
3. Pengembangan Sistem Pendataan Bengkel Karoseri
4. Penyusunan SOP dan Standar Teknis Pengawasan
5. Pembinaan dan Sosialisasi kepada Bengkel Karoseri
6. Monitoring dan Evaluasi Rutin

### **IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan**

#### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

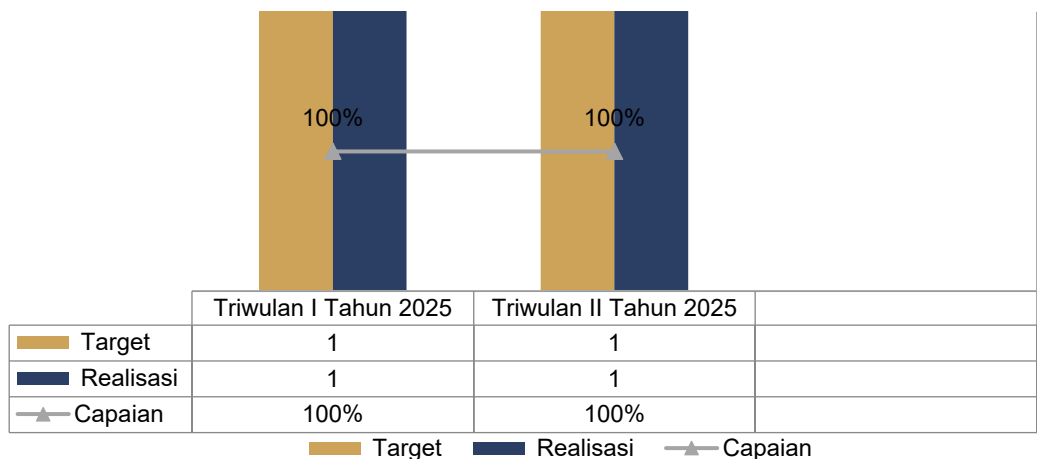
Pengawasan dan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan, pemasangan, dan pemanfaatan perlengkapan jalan (seperti rambu, marka, lampu lalu lintas, guardrail, cermin tikung, dan perlengkapan keselamatan lainnya) dilaksanakan sesuai standar teknis, ketentuan hukum, serta mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan pada tahun (n)}} \times 100\%$$

#### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 23** Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas yang meliputi Rambu, marka, APILL, Cermin tikung, guardrail, PJU, dan perlengkapan pendukung lain Mengatur standar desain, pemasangan, dan evaluasi teknis. Menjadi rujukan bagi tim pengawas dalam menentukan kesesuaian pengadaan dengan standar keselamatan jalan.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**(Lampiran 28)**

#### **b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan antara lain:

1. Ketersediaan Perencanaan yang Baik dan Tepat Sasaran
2. Dukungan Regulasi Teknis dan Administratif
3. SDM Pengawas yang Kompeten dan Terlatih
4. Pelaksanaan Pengawasan yang Konsisten dan Terjadwal
5. Pemanfaatan Sistem Pelaporan dan Dokumentasi Digital
6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

#### **d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan antara lain :

1. Spesifikasi Teknis Tidak Sesuai Standar
2. Kurangnya SDM Pengawas yang Kompeten
3. Pengawasan yang Tidak Terjadwal atau Tidak Konsisten
4. Lemahnya Koordinasi Antarinstansi

5. Tidak Tersedianya Sistem Pelaporan atau Dokumentasi yang Baik

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan sebesar 1 maka jika dibanding kan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

$$\text{Jumlah Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Karoseri di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 senilai Rp. 102.283.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0 atau mencapai 0%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Menyusun Perencanaan Berbasis Kebutuhan dan Data Teknis
2. Penguatan Kompetensi Tim Pengawas
3. Penyusunan SOP Pengawasan dan Evaluasi yang Jelas
4. Penguatan Koordinasi Antarinstansi
5. Tindak Lanjut Evaluasi dengan Sanksi atau Perbaikan

**IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Pengawasan dan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah proses pengendalian, pemantauan, dan penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan guna memastikan bahwa rambu, marka, lampu lalu lintas (APILL),

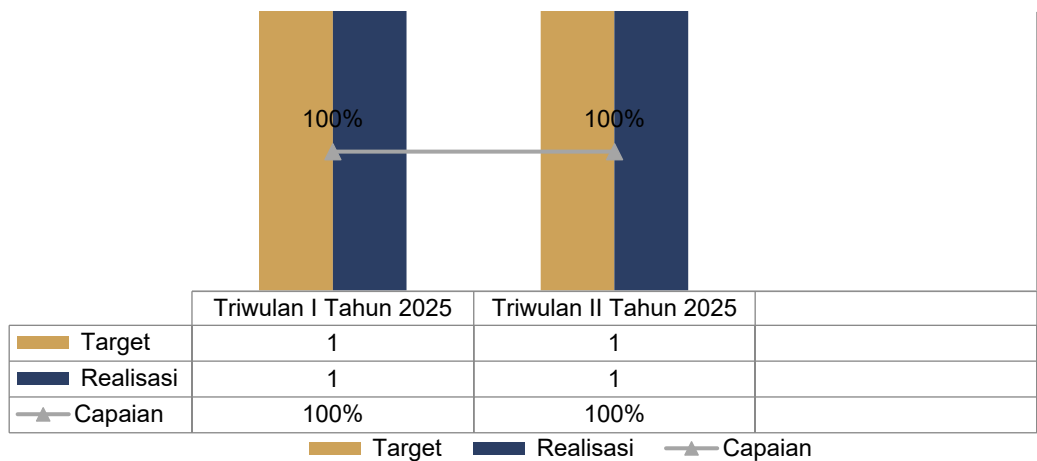
PJU, guardrail, dan perlengkapan lainnya tetap berfungsi baik, sesuai standar teknis, serta mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Cara menghitung :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target Kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada tahun (n)}} \times 100\%$$

### a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025

Capaian Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan tahun 2025 sebesar 1. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 24** Capaian IKK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas yang meliputi Rambu, marka, APILL, Cermin tikung, guardrail, PJU, dan perlengkapan pendukung lain Mengatur standar desain, pemasangan, dan evaluasi teknis. Menjadi rujukan bagi tim pengawas dalam menentukan kesesuaian pengadaan dengan standar keselamatan jalan.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM dan Sarana Prasarana yang menunjang Pelayanan Publik. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena

sejauh pelaksanaannya dan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik. **(Lampiran 29)**

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan memiliki target 1 Kegiatan yang Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan antara lain:

1. Perencanaan Pemeliharaan yang Sistematis dan Tepat Sasaran
2. Tersedianya SDM Teknis yang Kompeten
3. Penggunaan Standar dan Spesifikasi Teknis yang Tepat
4. Pengawasan Lapangan yang Rutin dan Terstruktur
5. Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan antara lain :

1. Tidak Adanya Jadwal Pemeliharaan Rutin dan Berkala
2. Minimnya SDM Pengawas yang Kompeten
3. Lemahnya Sistem Pelaporan dan Dokumentasi
4. Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan
5. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan data capaian diatas untuk IKK indikator Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar 1 maka jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 1 atau sama dengan 100%.

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah} \quad \text{Pengawasan} \quad \text{Evaluasi} \quad \text{Pengadaan} \quad \text{Perlengkapan} \quad \text{Jalan} \\ &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam upaya mewujudkan indikator Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali berupaya maksimal untuk melakukan berbagai upaya peningkatan terutama dalam peningkatan SDM. Hasil analisa dalam satu tahun, indikator kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, karena sejauh pelaksanaannya dan kegiatan Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di wilayah Provinsi Bali berjalan dengan baik.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan indikator Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025 senilai Rp. 0 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 0 atau mencapai 0%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Berbasis Data
2. Peningkatan Kompetensi SDM Pengawas
3. Pemanfaatan Sistem Digital Monitoring dan Evaluasi
4. Peningkatan Standar Spesifikasi Teknis dan Material
5. Optimalisasi Anggaran untuk Pemeliharaan dan Pengawasan
6. Tindak Lanjut Temuan Evaluasi dan Sanksi Terukur

**Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi active dan passive safety**

**Tabel II. 10** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi active dan passive safety

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	6	0
2.	Jumlah Kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	10	5

**IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman**

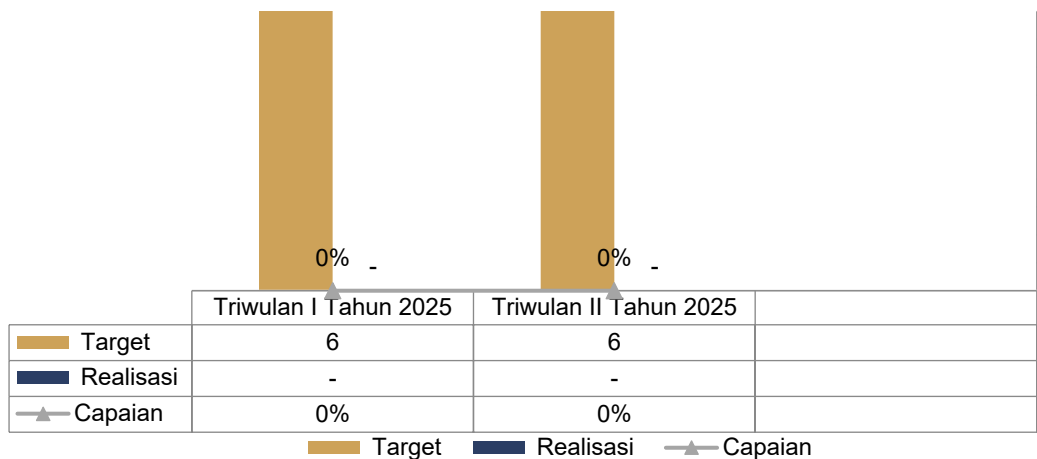
**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan yang dilakukan oleh pejabat atau petugas berwenang untuk memeriksa secara langsung kondisi fisik rancang bangun kendaraan bermotor, yang mencakup dimensi, konstruksi, dan perlengkapan utama kendaraan, untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan teknis dan keselamatan sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku.



**a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman pada tahun 2025 sebesar 0 %, untuk lebih jelasnya pencapaian realisasi terhadap target, tergambar pada grafik dibawah ini.



**Gambar II. 25** Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025

**a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

**a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (**Lampiran 30**), maka ditetapkan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

**b. Kronologi Target**

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terhadap Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety memiliki target 100 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan pada rapat Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman antara lain:

1. SDM yang berkompeten dan bersertifikat;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung;
3. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman antara lain:

1. Keterbatasan SDM yang berkompeten;
2. Sarana dan prasarana pemeriksaan yang tidak memadai;
3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pemohon atau industri karoseri.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai

$$\text{dengan pedoman} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\quad}{100} \times 100\% = \%$$

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 senilai Rp. 209.175.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 127.222.157 atau mencapai 60,82%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk peningkatan Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Membuat timeline target pelaksanaan kegiatan secara matang;
2. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pemeriksaan;
4. Digitalisasi proses dan pelaporan pemeriksaan.

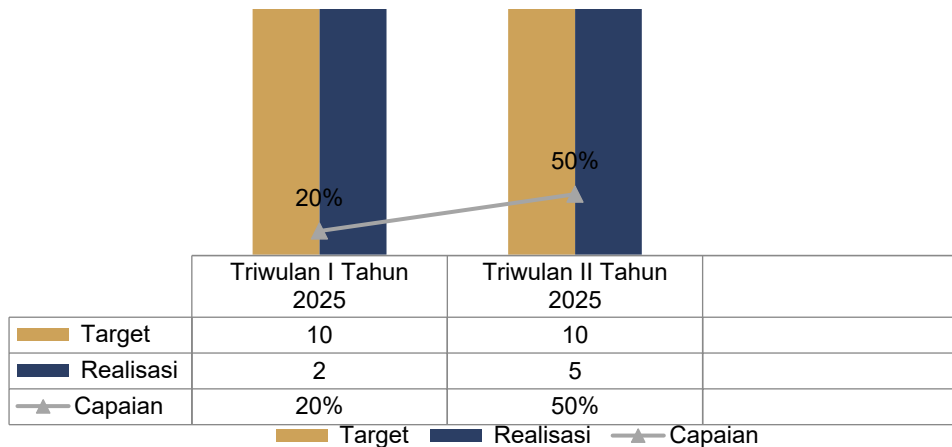
**IKK 10.2 Jumlah Kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah**

**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan alat uji kendaraan bermotor pada unit pelaksana pengujian di daerah tetap memenuhi standar akurasi dan keandalan pengukuran, melalui proses kalibrasi yang dilakukan secara berkala oleh lembaga yang berwenang atau laboratorium kalibrasi terakreditasi, sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

## A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025

Capaian Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah tahun 2025 sebesar 50%, dimana pencapaian ini terealisasi pada Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya pencapaian realisasi terhadap target, tergambar pada grafik dibawah ini.



**Gambar II. 26** Capaian IKK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **(Lampiran 31)**.

#### b. Kronologi Target

Pada Revisi I perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Uji Kalibrasi Alat Uji Berkala di daerah memiliki target 10 kegiatan berdasarkan arahan dari pimpinan pada rapat Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

#### c. Faktor Keberhasilan

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten;
2. Sistem Penjadwalan dan monitoring kalibrasi yang baik;
3. Evaluasi secara berkala.

#### d. Faktor Potensi Kegagalan

1. Masih terdapatnya SDM yang kurang berkompeten;
2. Keterbatasan anggaran dan dukungan pendanaan;
3. Kondisi peralatan uji tidak layak kalibrasi.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Untuk realisasi Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah pada Triwulan II sebesar 5 kegiatan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 10 kegiatan, sehingga capaiannya dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{5}{10} \times 100 \% \\ &= 50\%\end{aligned}$$

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 senilai Rp. 0 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp.0 atau mencapai 0%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM;
2. Pemeliharaan rutin peralatan uji;
3. Digitalisasi pengelolaan kalibrasi.

**Sasaran Kegiatan 11 : Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan**

**Tabel II. 11** Sasaran Kegiatan Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	10	0 Unit

**IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis**

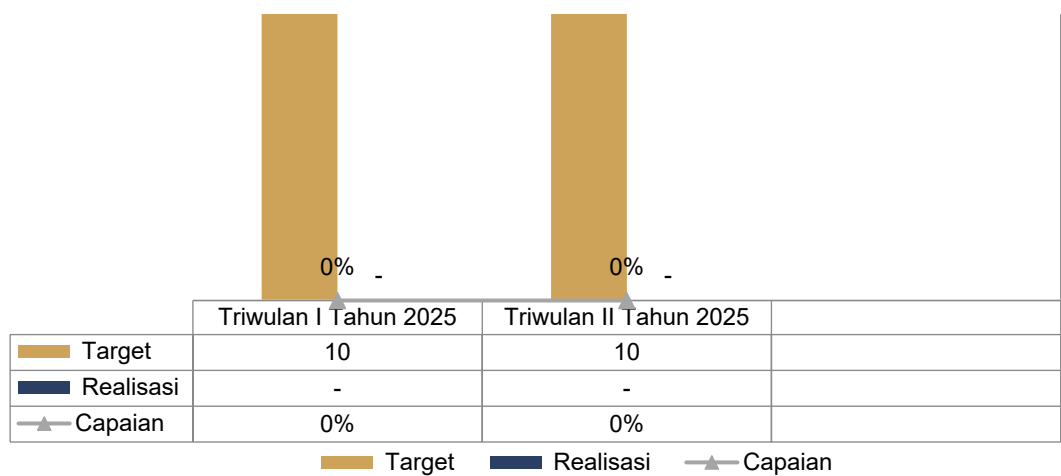
**a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Jumlah unit perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas/APIII, guardrail, delineator, cermin tikung, dan lainnya)

yang telah selesai dibangun atau dipasang serta telah berfungsi atau dioperasikan di lapangan, sesuai dengan standar atau spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh regulasi atau pedoman teknis yang berlaku.

### **A.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 10 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik dibawah ini.



**Gambar II. 27** Capaian Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis

### **a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis penyelenggaraan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. **(Lampiran 32).**

#### **b. Kronologi Target**

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis terhadap menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan memiliki target 10 yang diperoleh dari arahan pimpinan pada rapat Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis antara lain:

1. Perencanaan teknis yang matang;
2. Ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu;
3. Kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan standar.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis antara lain:

1. Perencanaan yang tidak akurat;
2. Keterbatasan atau keterlambatan anggaran;
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis di Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{10} \times 100\% = 0\%$$

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis Tahun 2025 senilai Rp. 7.987.905.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp 4.532.172.851 atau mencapai 56,74%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis;
2. Optimalisasi alokasi dan realisasi anggaran;
3. Peningkatan sistem pengawasan dan monitoring;

**Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat**

**Tabel II. 12** Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi s.d Triwulan II
1.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	2

2.	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1
3.	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	2
4.	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	1
5.	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	1
6.	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1
7.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	0
8.	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1
9.	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	0
10.	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2
11.	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1
12.	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi Hukum	Kegiatan	1	0

Sumber : Data Diolah dari Sub bagian Tata Usaha

#### **IKK 4.1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat**

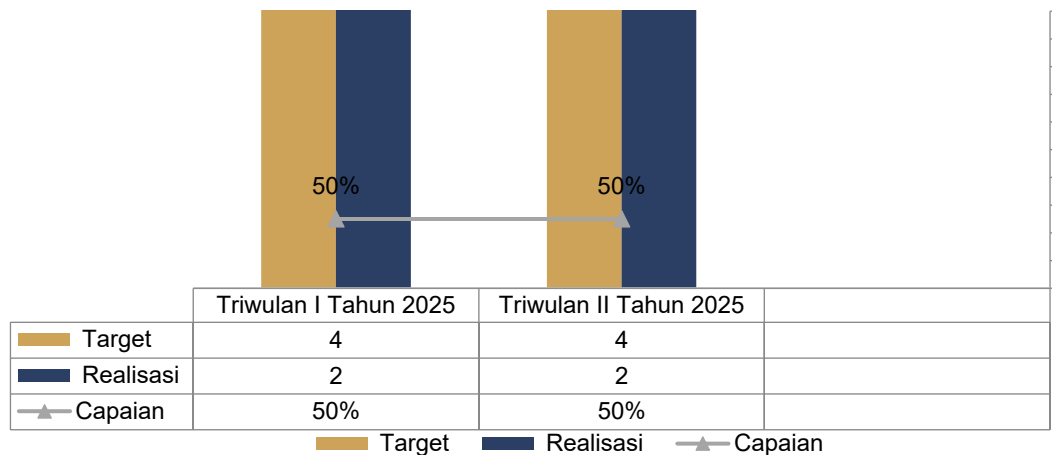
##### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mencakup berbagai program strategis untuk mendukung pengembangan sistem transportasi darat yang aman, efisien, dan berkelanjutan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali, seperti : Penyusunan RKA-KL Pagu Kebutuhan, pagu indikatif, pagu alokasi dan pagu anggaran.

##### **a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 sebesar 2 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 4 maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7. Grafik

Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 28** Grafik Capaian IKK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

### a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum untuk kegiatan untuk kegiatan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(**Lampiran 33**).

#### b. Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel target 4 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali pada tahun 2025 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik terhadap Ditjen Perhubungan Darat. Adapun beberapa tahapan dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat, yaitu :

1. Penyusunan RKA-K/L Pagu Kebutuhan;
2. Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif;
3. Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi;
4. Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran.



**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berkompeten;
2. Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi antar unit yang baik.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompeten;
2. Keterlambatan dalam Penyusunan;
3. Lemahnya koordinasi internal.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 2 atau 50%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 4 kegiatan

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan Kualitas perencanaan berbasis kinerja dengan memperhatikan output dan outcome yang jelas dan terukur;
2. Penguatan Koordinasi internal dan eksternal guna meningkatkan sinergi antar unit kerja.

**IKK 4.2. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat**

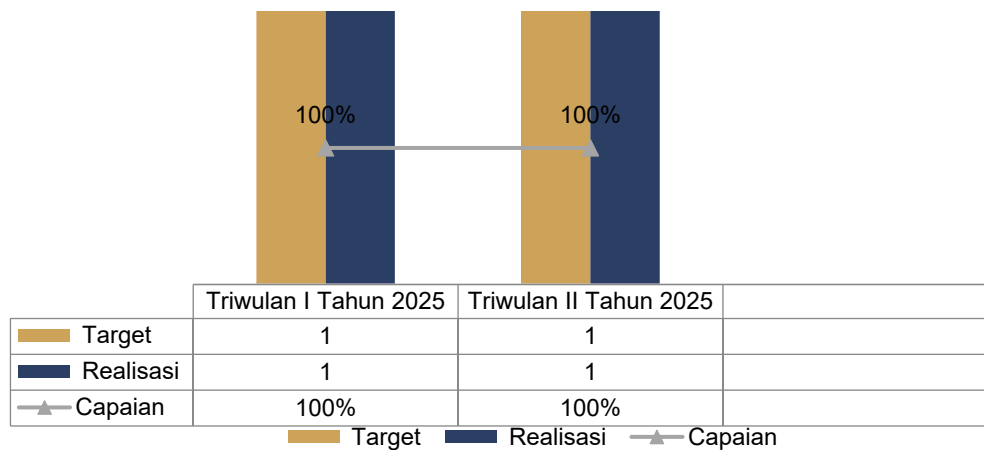
**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, pengukuran,

pelaporan, evaluasi, dan perbaikan kinerja yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan berfokus pada hasil (outcome) dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2025 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 29** Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

#### **a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

##### **a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk kegiatan untuk kegiatan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(**Lampiran 34**).

##### **b. Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Akuntabel target 1 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM;
2. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja yang konsisten;
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Kapasitas SDM yang terbatas;
2. Minimnya koordinasi antarunit;
3. Penggunaan Sistem Informasi Kinerja yang tidak maksimal.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 1 atau 100%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 1 kegiatan

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perbaikan perencanaan kinerja berbasis hasil (Outcome);
2. Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja;
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan yang konsisten.

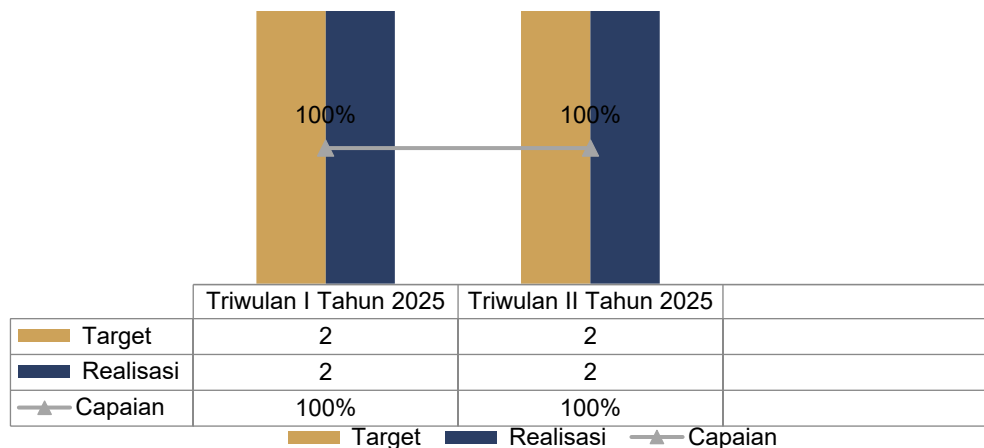
**IKK 4.3. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan adalah upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dalam rangka menilai dan meningkatkan tingkat kematangan implementasi pengendalian intern, yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan tahun 2025 sebesar 2 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 2 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 30** Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan

**a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

**a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk kegiatan untuk Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian/Lembaga **(Lampiran 35)**.

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan target 2 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM;
2. Ketersediaan dokumen dan bukti pendukung;
3. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Pemahaman SDM yang rendah terhadap SPIP;
2. Dokumen dan bukti pendukung tidak lengkap;
3. Penggunaan Sistem Informasi yang lemah..

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 2 atau 100%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 2 kegiatan

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pembentukan dan Penguatan Tim SPIP di setiap unit kerja;
2. Penerapan Manajemen Risiko yang konsisten;
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan yang konsisten.

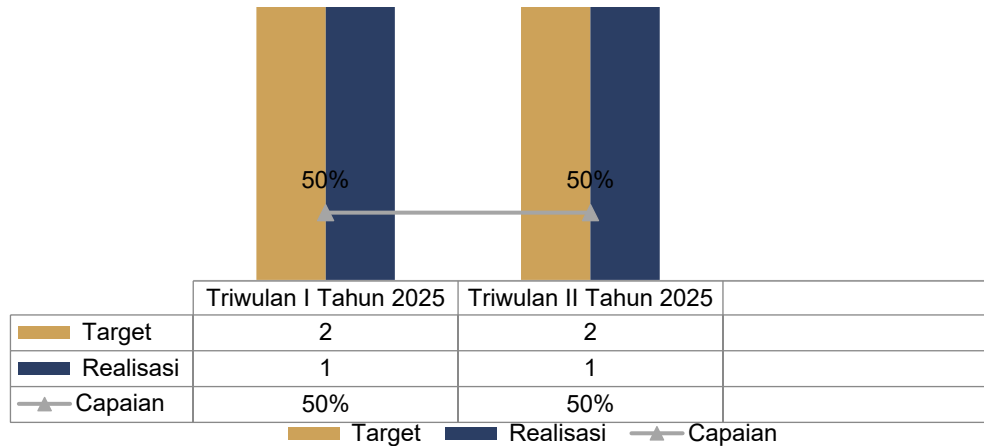
**IKK 4.4. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di Ditjen Perhubungan Darat merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan tata kelola anggaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran, efektivitas program, serta akuntabilitas keuangan negara di sektor transportasi darat.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 sebesar 2 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 2 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 31** Grafik Capaian IKK Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat

**a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

**a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan **(Lampiran 36)**.

**b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat target 2 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

**c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM;

2. Perencanaan Anggaran yang realistis dan tepat waktu;
3. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi keuangan yang optimal.

**d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. SDM pengelola anggaran tidak kompeten/minim pelatihan;
2. Keterlambatan proses pengadaan dan kontrak;
3. Keterlambatan atau ketidaktepatan revisi anggaran.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 1 atau 50%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 2 kegiatan

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Anggaran;
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara berkala;
3. Optimalisasi Penggunaan aplikasi keuangan dan monitoring.

**IKK 4.5. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan**

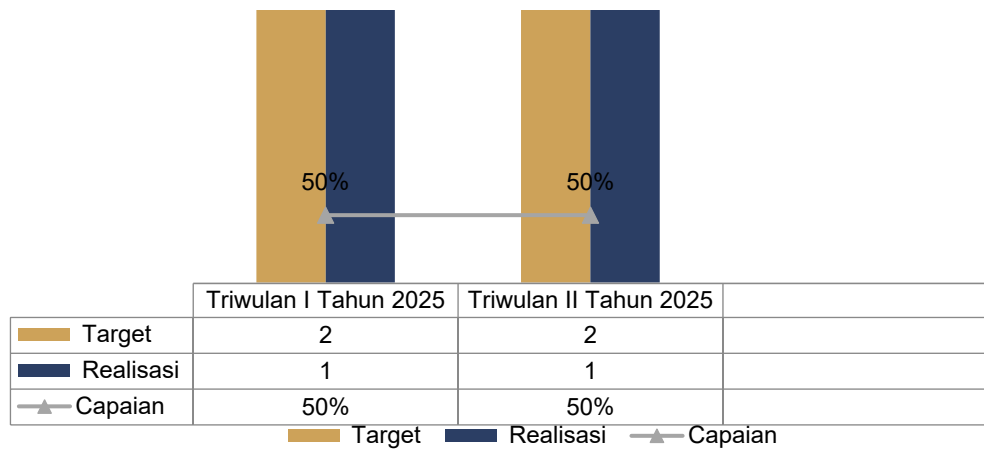
**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Rekomendasi audit/pemeriksaan adalah saran, usulan, atau tindakan perbaikan yang diberikan oleh auditor atau pemeriksa sebagai hasil dari proses evaluasi sistematis terhadap proses, aktivitas, atau kinerja suatu entitas.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan tahun 2025 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 2 maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Tingkat

Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 32** Grafik Capaian IKK Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lampiran 15);
2. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (**Lampiran 37**).

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan memiliki target 2 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan antara lain:

1. Budaya Pengawasan dan Perbaikan Berkelanjutan;
2. Keterlibatan Aktif Unit Kerja terkait;
3. Pemanfaatan Teknologi dan Data yang optimal.

#### d. Faktor Potensi Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan antara lain:

1. Rekomendasi tidak diperbaharui sesuai perkembangan;



2. Lemahnya sistem monitoring dan tindak lanjut;
3. Tidak tersedia Sumber Daya.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 1 atau 50%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 2 kegiatan.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi tindak lanjut yang kuat;
2. Mengembangkan rekomendasi yang SMART;
3. Memberikan penghargaan bagi unit kerja yang responsive, cepat, dan tuntas dalam implementasi rekomendasi audit.

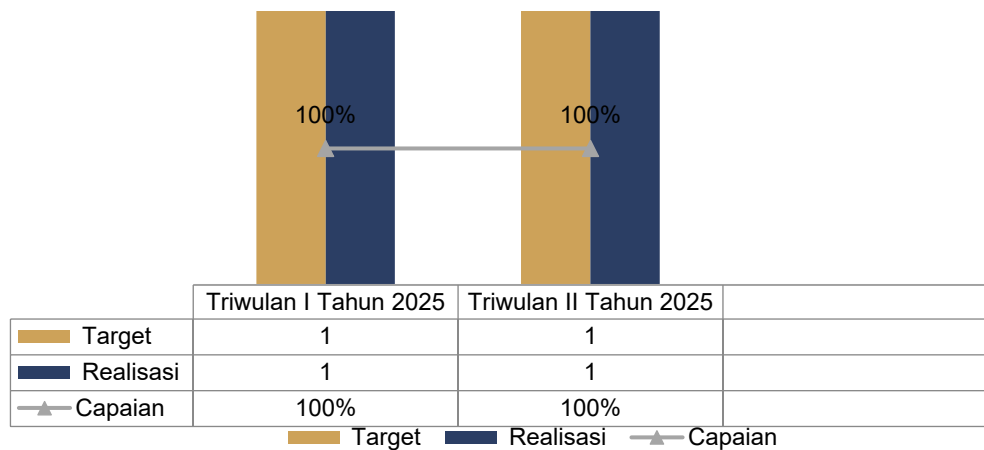
**IKK 4.6. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat adalah serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik negara (BMN) atau aset lainnya, yang dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 33** Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat

### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan (**Lampiran 38**).

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat memiliki target 1 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur BMN;
2. Ketertiban penatausahaan dan pelaporan;
3. Keakuratan dan integritas data aset.

#### d. Faktor Potensi Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya Kompetensi SDM Pengelola Aset;
2. Tidak adanya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang tepat;
3. Pengelolaan belum terintegrasi dengan sistem dan teknologi.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 1 atau 100%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 1 dokumen.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pemutakhiran dan validasi data BMN secara berkala;
2. Penguatan Kapasitas SDM pengelola aset;
3. Penyusunan dan pelaksanaan RKBMN yang tepat dan terukur.

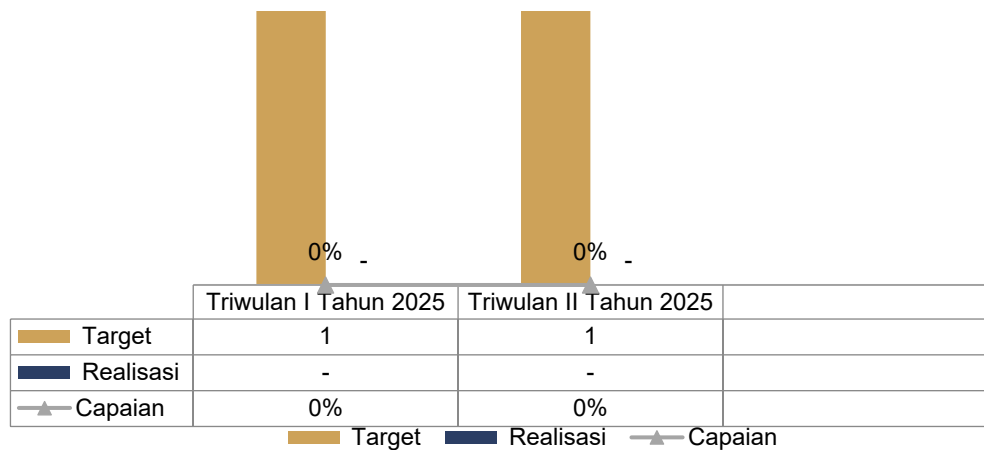
**IKK 4.7. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Sudah Diselesaikan (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat adalah persentase atau tingkat keberhasilan satuan kerja dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi SP4N-LAPOR dan/atau kanal internal pengaduan, sesuai dengan prosedur, waktu penyelesaian, dan kualitas respons yang ditetapkan oleh regulasi dan standar pelayanan publik.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat tahun 2025 sebesar 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 34** Grafik Capaian IKK Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Perhubungan;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap SP4N-LAPOR (**Lampiran 39**).

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) memiliki target 1 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) antara lain:

1. Respons cepat dan tepat terhadap laporan;
2. Ketersediaan SDM dan Unit Pengelolaan Pengaduan yang pengaduan;
3. Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi.

#### d. Faktor Potensi Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) antara lain:

1. Lambatnya respons terhadap aduan;
2. Pengelolaan Admin LAPOR tidak efektif;

3. Kurangnya SDM atau beban kerja yang tidak seimbang.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 0 atau 0%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 1 dokumen.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan peran dan fungsi admin LAPOR;
2. Peningkatan komitmen dan pengawasan pimpinan;
3. Optimalisasi sistem dan teknologi informasi.

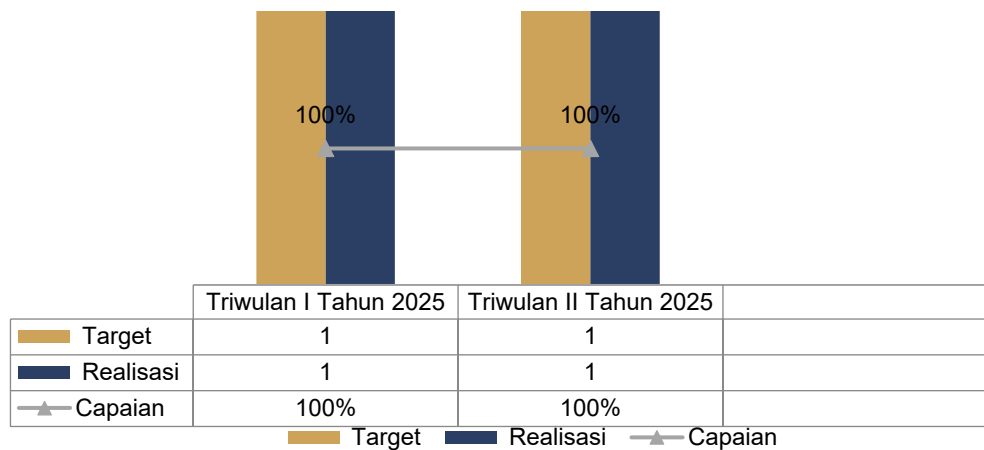
**IKK 4.8. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) adalah pengukuran tingkat pencapaian unit kerja dalam melakukan alih media arsip dari bentuk fisik ke bentuk digital, sesuai dengan kaidah kearsipan dan standar yang ditetapkan, untuk tujuan pelestarian, kemudahan akses, efisiensi pengelolaan, dan peningkatan akuntabilitas tata kelola dokumen. Skor digitalisasi arsip mencerminkan sejauh mana organisasi telah melaksanakan proses digitalisasi secara sistematis dan terdokumentasi dalam mendukung manajemen arsip modern.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) tahun 2025 sebesar 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 35** Grafik Capaian IKK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

### **a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Permenpan -RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE (Lampiran 40).

#### **b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) memiliki target 1 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

1. Ketersediaan SDM yang kompeten di bidang kearsipan;
2. Ketersediaan peralatan pendukung;
3. Dokumen arsip terklasifikasi dan teridentifikasi dengan baik.

#### **d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

1. SDM tidak memadai atau tidak berkompeten;
2. Infrastruktur dan peralatan pendukung tidak memadai;
3. Kurang terintegrasi dengan sistem kearsipan elektronik.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 1 atau 100%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 1 dokumen.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan kapasitas SDM arsip;
2. Penataan arsip fisik sebelum digitalisasi;
3. Integrasi hasil digitalisasi dengan sistem arsip nasional (SRIKANDI).

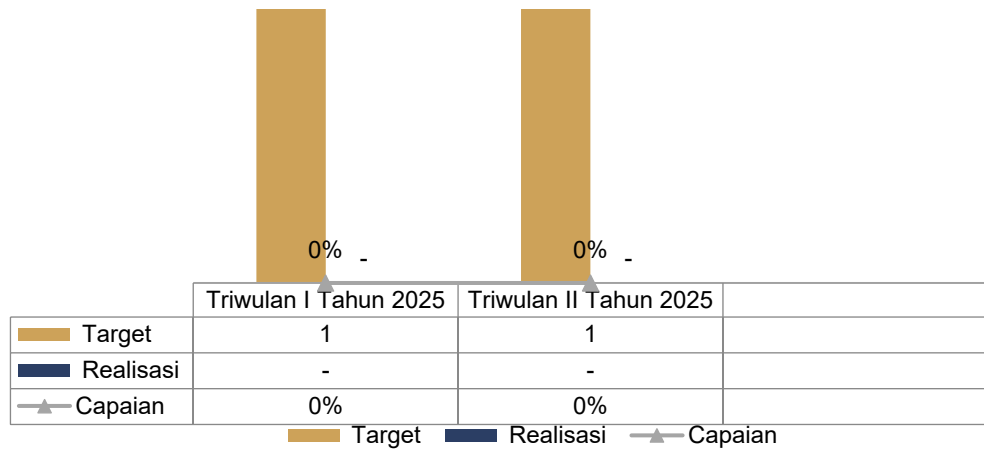
**IKK 4.9. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup seluruh tahapan pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima dan pengawasan, dengan tujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara secara optimal dan mencegah penyimpangan.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar 0 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) pada Ditjen Perhubungan Darat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 36** Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

### ***a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan***

#### **a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**Lampiran 41**).

#### **b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target 1 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Ketersediaan dan Kompetensi SDM Pengadaan;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (SPBE dan E-Katalog);
3. Pemilihan Penyedia yang kredibel dan kompetitif.

#### **d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. SDM tidak memadai atau tidak berkompeten;
2. Dokumen pengadaan tidak lengkap atau tidak sesuai;
3. Keterlambatan pelaksanaan tender dan kontrak.



**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 0 atau 0%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 1 dokumen.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM pengadaan;
2. Optimalisasi penggunaan teknologi pengadaan;
3. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Internal.

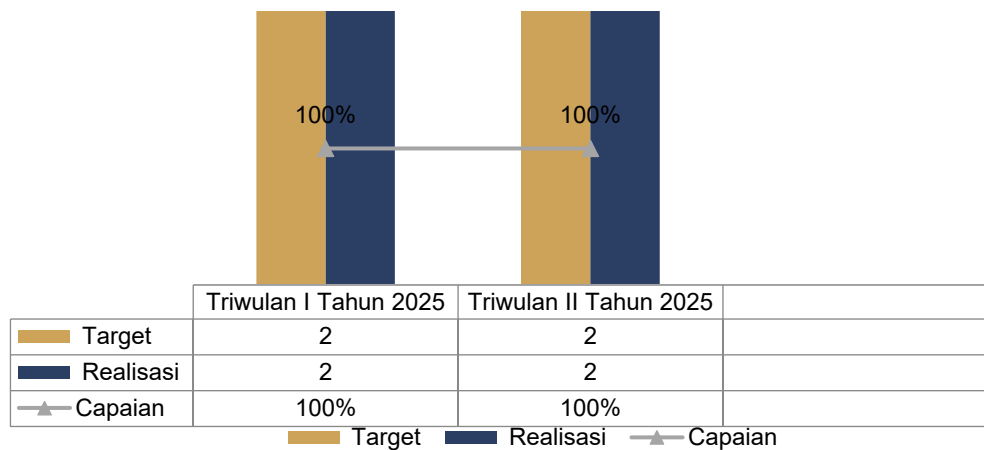
**IKK 4.10. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis oleh suatu unit kerja untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, kinerja, dan profesionalisme pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan pelayanan publik.

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja tahun 2025 sebesar 2 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 2 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 37** Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja

### a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

#### a. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. KM 17 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui mekanisme Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Perhubungan **(Lampiran 42)**.

#### b. Kronologi Target

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja memiliki target 2 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### c. Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan kompetensi yang tepat;
2. Pemanfaatan Teknologi dan sistem digital;
3. Komitmen dan dukungan pimpinan.

#### d. Faktor Potensi Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja antara lain:

1. Perencanaan Pengembangan SDM yang lemah;
2. Keterbatasan anggaran dan alokasi yang tidak tepat;
3. SDM tidak termotivasi atau kurang kesadaran.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 2 atau 100%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 2 dokumen.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Kerja Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan alokasi dan efektivitas anggaran pengembangan SDM;
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebutuhan Pengembangan SDM;
3. Optimalisasi Platform dan Teknologi digital.

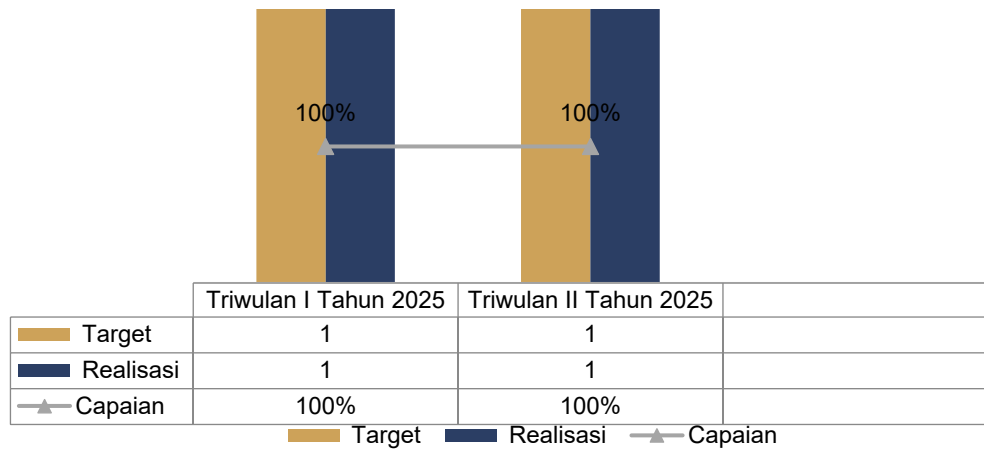
**IKK 4.11. Kegiatan Mendukung Pembangunan ZI**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah serangkaian upaya sistematis yang dilaksanakan oleh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi pada area-area perubahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2025 sebesar 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 38** Grafik Capaian IKK Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI)

### ***a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan***

#### **a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**Lampiran 43**).

#### **b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) memiliki target 1 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) Unit Kerja antara lain:

1. Komitmen dan Keteladanan Pimpinan;
2. Tim Kerja ZI yang solid dan kompeten;
3. Perencanaan dan Monitoring yang terstruktur.

#### **d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) antara lain:

1. Komitmen pimpinan yang lemah atau tidak konsisten;
2. Tim ZI tidak aktif atau kurang kompeten;
3. Kegiatan ZI hanya bersifat seremonial/formalitas.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 1 atau 100%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 1 dokumen.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan Komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. Pembentukan dan Penguatan Tim kerja ZI;
3. Penyusunan Rencana aksi ZI yang terukur dan realistis.

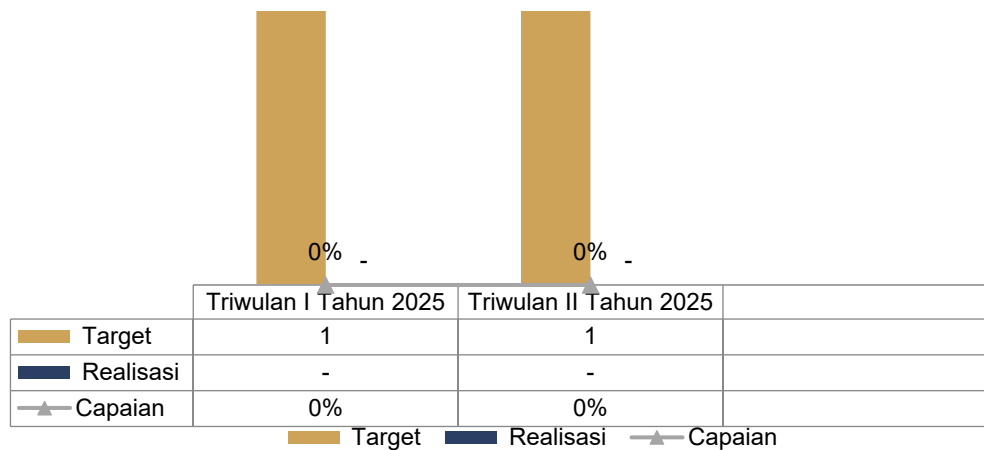
**IKK 4.12. Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum**

**a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah untuk mendorong terciptanya sistem hukum nasional yang efektif, adil, bersih, dan transparan melalui keterlibatan dalam penyusunan, harmonisasi, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum, sebagai bagian dari pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

**a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Bali Tahun 2025**

Capaian Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum tahun 2025 sebesar 1 kegiatan jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2025 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7. Grafik Capaian IKK Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.



**Gambar II. 39** Grafik Capaian IKK Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum

### **a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

#### **a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum untuk Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (**Lampiran 44**).

#### **b. Kronologi Target**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum memiliki target 1 dokumen yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan.

#### **c. Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum antara lain:

1. Komitmen dan Keteladanan Pimpinan;
2. Kapasitas SDM Hukum yang profesional dan responsif;
3. Evaluasi dan Review regulasi secara berkala.

#### **d. Faktor Potensi Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum antara lain:

1. Komitmen pimpinan yang lemah atau tidak konsisten;
2. SDM Hukum yang terbatas atau kurang kompeten;
3. Tidak adanya monitoring dan evaluasi regulasi.

**e. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan pencapaian Tahun 2025, Capaian Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali tercapai sebesar 0 atau 0%. Dimana target dalam tahun 2025 secara keseluruhan adalah mencapai 1 dokumen.

**f. Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Mendukung Kebijakan dan Reformasi Hukum Tahun 2025 senilai Rp. 332.170.000 dengan realisasi di Triwulan II Tahun 2025 Rp. 173.851.263 atau mencapai 52,34%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Penguatan Komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. Pembentukan dan Penguatan SDM Hukum yang berkompeten;
3. Pelaksanaan Kajian dan Review regulasi secara rutin.

## II.3 REALISASI ANGGARAN

### II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

#### II.3.1.1. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp 98.687.220.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II. 13** Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

<b>RM</b>	Rp.	<b>82.251.230.000,-</b>	83%
<b>PNBP</b>	Rp.	<b>16.435.990.000,-</b>	17%
<b>SBSN</b>	Rp.	-	0%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>98.687.220.000,-</b>	<b>100%</b>

**Tabel II. 14** Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

<b>Belanja Pegawai</b>	Rp.	15.226.160.000	15,42%
<b>Belanja Barang</b>	Rp.	52.466.140.000	53,16%
<b>Belanja Modal</b>	Rp.	30.994.920.000	31,42%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>98.687.220.000</b>	<b>100%</b>

Terdapat perubahan dan pergeseran komponen pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali TA. 2025 akibat adanya Revisi DIPA di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II. 15** Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan II TA. 2025

<b>RM</b>	Rp.	<b>82.251.230.000,-</b>	83,34%
<b>PNBP</b>	Rp.	<b>16.435.990.000,-</b>	16,66%
<b>SBSN</b>	Rp.	-	0%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>98.687.220.000,-</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

**Tabel II. 16** Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan II TA. 2025

<b>Belanja Pegawai</b>	Rp.	15.226.160.000	15,42%
<b>Belanja Barang</b>	Rp.	52.466.140.000	53,16%
<b>Belanja Modal</b>	Rp.	30.994.920.000	31,40%
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>98.687.220.000</b>	<b>100%<sup>2</sup></b>

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

Pengurangan dan pergeseran pada komponen tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 2 Desember 2024 perihal



Pengesahan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 **(Lampiran 45)**;

- b. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-1) **(Lampiran 46)**;
- c. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 22 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-2) **(Lampiran 47)**;
- d. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-3) **(Lampiran 48)**;
- e. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-4) **(Lampiran 49)**;
- f. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-5) **(Lampiran 50)**;
- g. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-6) **(Lampiran 51)**;
- h. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi ke-7) **(Lampiran 52)**.

### II.3.1.2. Refocussing Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran atas DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-022.03.2.403852/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Kementerian Perhubungan TA. 2024 (Revisi ke-7) sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali saat ini masih tetap sama seperti pagu awal. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja

**Tabel II. 17** Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000
REVISI KE-1	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000
REVISI KE-2	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000
REVISI KE-3	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000
REVISI KE-4	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000
REVISI KE-5	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000
REVISI KE-6	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000
REVISI KE-7	82.251.230.000	16.435.990.000	-	98.687.220.000

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

**Tabel II. 18** Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000
REVISI KE-1	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000
REVISI KE-2	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000
REVISI KE-3	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000
REVISI KE-4	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000
REVISI KE-5	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000
REVISI KE-6	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000
REVISI KE-7	15.226.160.000	52.466.140.000	30.994.920.000	98.687.220.000

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

**Tabel II. 19** Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>15.226.160.000</b>	<b>0</b>	<b>15.226.160.000</b>	<b>0</b>
<b>Belanja Barang</b>	<b>52.466.140.000</b>	<b>0</b>	<b>52.466.140.000</b>	<b>0</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>30.994.920.000</b>	<b>0</b>	<b>30.994.920.000</b>	<b>0</b>
· RM	<b>82.251.230.000</b>	0	<b>82.251.230.000</b>	0
· PNBP	<b>16.435.990.000</b>	0	<b>16.435.990.000</b>	0
· SBSN				
<b>TOTAL</b>	<b>98.687.220.000</b>	<b>0</b>	<b>98.687.220.000</b>	<b>0</b>

Sumber : Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi) :

**Tabel II. 20** Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
<b>022.03</b>	<b>BPTD Kelas II Bali</b>	<b>98.687.220.000</b>	<b>98.687.220.000</b>	<b>23.775.819.036</b>	<b>24,09</b>
<b>022.03.GA</b>	<b>Program Infrastruktur</b>	<b>75.979.765.000</b>	<b>75.979.765.000</b>	<b>12.632.058.810</b>	<b>16,62</b>
	<b>Konektivitas</b>				
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	11.474.023.000	11.474.023.000	1.549.244.060	13,50
4638	Pelayanan Transportasi Darat	24.401.304.000	24.401.304.000	5.498.111.019	22,53
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	36.053.030.000	36.053.030.000	4.974.515.881	13,80
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.051.408.000	4.051.408.000	610.187.850	15,06
<b>022.03.WA</b>	<b>Program Dukungan</b>	<b>22.707.455.000</b>	<b>22.707.455.000</b>	<b>11.143.760.226</b>	<b>49,07</b>
	<b>Manajemen</b>				
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	194.500.000	194.500.000	-	-
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.286.795.000	7.286.795.000	2.734.868.935	37,53
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	15.226.160.000	15.226.160.000	8.408.891.291	55,23

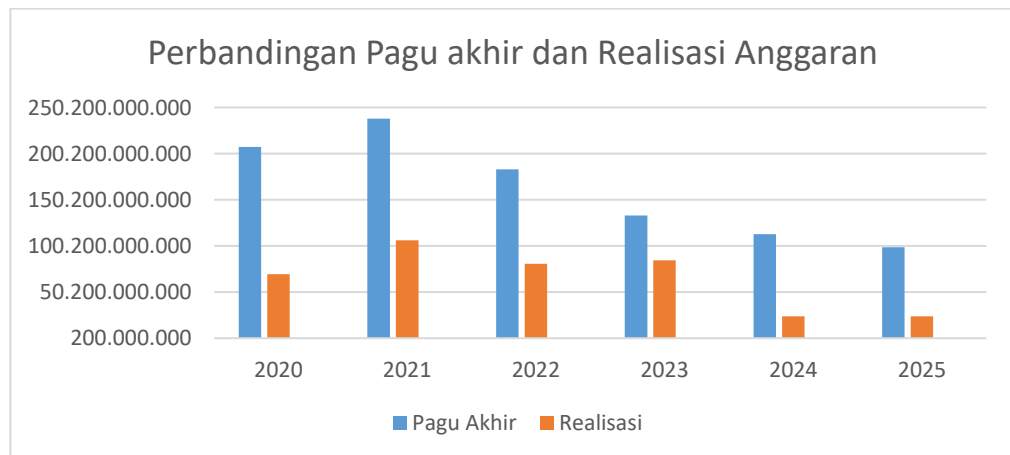
### II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 21** Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	337.325.940.000	207,505,364,000	69.571.014.765	33,53%
2	2021	329.189.194.000	238.120.499.000	106.165.228.242	44,58%
3	2022	179.939.014.000	183.117.490.000	80.904.126.121	44,18%
4	2023	138.884.749.000	133.248.214.000	84.445.680.381	63,37%
5	2024	113.027.469.000	113.027.469.000	23.866.787.636	21,12%
6	2025	98.667.220.000	98.667.220.000	23.775.819.036	24,09%

Sumber: Data diolah dari Tim Pengelola Keuangan, BPTD Kelas II Bali



**Gambar II. 40** Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020– Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 69.571.014.765,- atau mencapai 33,53% dari pagu akhir Rp. 207.505.364.000,-. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 106.165.228.242,- atau mencapai 44,58% dari pagu akhir Rp. 238.120.499.000,- dan pada tahun 2022 anggaran yang terserap sebesar Rp. 80.904.126.121,- atau mencapai 44,18% dari pagu akhir sebesar Rp. 183.117.490.000,- dan pada tahun 2023 di Triwulan I anggaran yang terserap sekitar Rp. 84.445.680.381 atau mencapai 63,37% dari pagu akhir sebesar Rp. 133.248.214.000,-. Pada Tahun 2024 di Triwulan I anggaran yang terserap yaitu Rp 23.866.787.636 dari pagu akhir Rp 113.027.469.000. Pada Tahun 2025 di Triwulan II anggaran yang terserap yaitu Rp 23.775.819.036 dari pagu akhir Rp 98.687.220.000..

### II.3.2 Realisasi Anggaran

#### II.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

**Tabel II. 22** Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
022.03	BPTD Kelas II Bali	<b>98.687.220.000</b>	<b>98.687.220.000</b>	<b>23.775.819.036</b>	<b>24,09</b>
022.03.GA	Program Infrastruktur	<b>75.979.765.000</b>	<b>75.979.765.000</b>	<b>12.632.058.810</b>	<b>16,62</b>
	Konektivitas Infrastruktur	11.474.023.000	11.474.023.000	1.549.244.060	13,50
4637	Konektivitas Transportasi Darat				
4638	Pelayanan Transportasi Darat	24.401.304.000	24.401.304.000	5.498.111.019	22,53
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	36.053.030.000	36.053.030.000	4.974.515.881	13,80
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.051.408.000	4.051.408.000	610.187.850	15,06
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	<b>22.707.455.000</b>	<b>22.707.455.000</b>	<b>11.143.760.226</b>	<b>49,07</b>
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	194.500.000	194.500.000	-	-
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.286.795.000	7.286.795.000	2.734.868.935	37,53

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	15.226.160.000	15.226.160.000	8.408.891.291	55,23

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 23.775.819.036,-** atau mencapai **24,09%** dari total pagu sebesar **Rp. 98.697.220.000,-**.

#### II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah dianalisis per Triwulan II untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 23** Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp. (000)	Rp. (000)	%
1	Belanja Pegawai	15.226.160	8.408.891	55,23
2	Belanja Barang	52.466.140	11.466.817	21,86
3	Belanja Modal	30.994.920	3.900.110	12,58
<b>TOTAL</b>		<b>98.687.220</b>	<b>14.322.802</b>	<b>23.775.819</b>

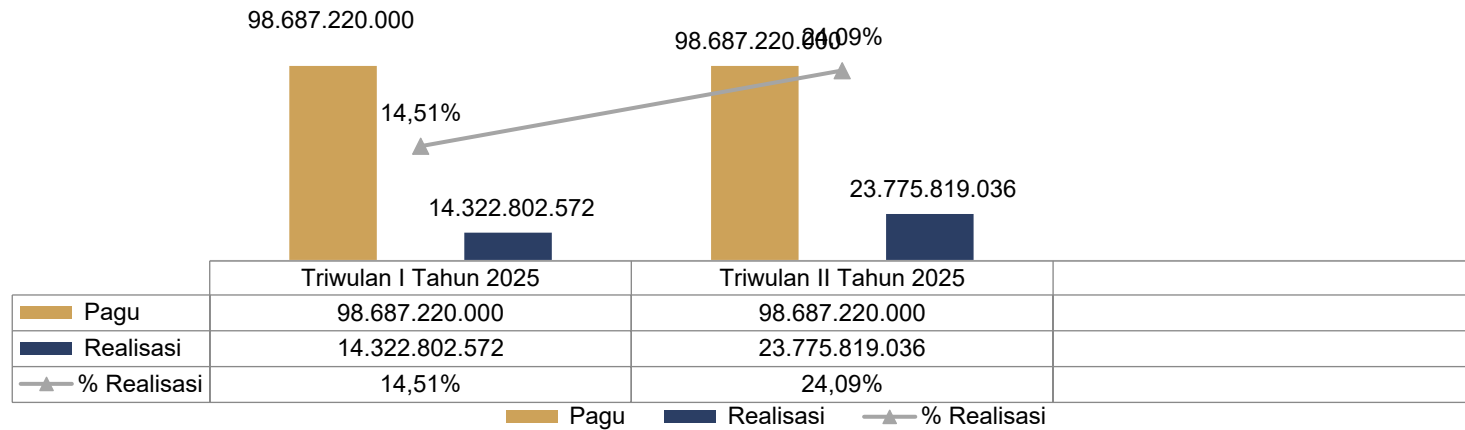
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2025 pada Triwulan II realisasi sebesar 24,09%.

### II.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 24** Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp. (000)	Rp. (000)	%
1	Rupiah Murni	82.251.230	23.775.819	28,91
2	PNBP	16.435.990	-	
3	SBSN			
<b>TOTAL</b>		<b>98.687.220</b>	<b>23.775.819</b>	<b>24,09</b>



**Gambar II. 41** Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2025



Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2025 dari Triwulan II sebesar 24,09%.

II.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 25** Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	15.226.160.000	8.408.891.291	6.817.268.709
2	Belanja Barang	52.466.140.000	11.466.817.052	40.999.322.948
3	Belanja Modal	30.994.920.000	3.900.110.693	27.233.870.107
<b>TOTAL</b>		<b>98.686.220.000</b>	<b>14.322.802.572</b>	<b>23.775.819.036</b>

**Tabel II. 26** Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	<b>82.251.230.000</b>	<b>23.775.819.036</b>	<b>56.475.410.964</b>
2	PNBP	<b>16.435.990.000</b>	-	<b>16.435.990.000</b>
3	SBSN			
<b>TOTAL</b>		<b>98.687.220.000</b>	<b>14.322.802.572</b>	<b>23.775.819.036</b>

**Tabel II. 27** Rincian sisa Anggaran Tahun 2025

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-
2	Kegiatan yang Terblokir		-
3	Sisa Kontraktual		-
	<b>a. Belanja Barang</b>		-

	<b>b. Belanja Modal</b>		-
4	Sisa Non Kontraktual		-
	<b>a. Belanja Barang</b>	52.466.140.000	11.466.817.052
	<b>b. Belanja Modal</b>	30.994.920.000	3.900.110.693
5	Sisa Belanja Pegawai	15.226.160.000	8.408.891.291
<b>TOTAL</b>			<b>23.775.819.036</b>

Dari total pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebesar Rp 98.687.220.000,- (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang baru terealisasi pada Triwulan I sebesar Rp 14.322.802.572,- (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 14,51% sehingga total dana yang belum terserap pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali adalah sebesar Rp 74.911.400.964,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Empat Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 75,91%.

### II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II. 28** Efisiensi anggaran

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan II		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)
1	SK2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan	100%	28,38%	71,62%
2	SK3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi	75%	53,48%	21,52%
3	SK5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	50%	22,19%	27,81%
4	SK6	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau	100%	12,89%	87,11%
5	SK7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	71,42%	46,47%	24,95%
6	SK8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP	80%	25,19%	54,81%
7	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	61,85%	63,54%	-1,69%
8	SK10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	25%	30,41%	-5,41%

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan II		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)
9	SK11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	0%	56,74%	-56,74%
10	SK4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	62,5%	52,34%	10,16%
<b>Total</b>			<b>62,57%</b>	<b>39,16%</b>	<b>23,41%</b>

Berdasarkan data di atas pada Triwulan II dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 62,57%, dengan realisasi anggaran sebesar 39,16% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 23,41%.

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia per Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II. 29** Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	564	278	49,29%	2,32	64,57%	27,8%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 2,32% dengan realisasi sebesar 64,57% menunjukan capaian kinerja sebesar 27,8% dengan realisasi sebanyak 278 SDM dari jumlah kebutuhan sebesar 564, dimana realisasi tersebut terdiri atas 138 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 140 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

#### **II.3.4 Hambatan dan Kendala**

Adapun beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi saat ini ialah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan daya serap anggaran yang belum mencapai target pada beberapa kegiatan;
2. Sumber Daya Manusia yang kurang berkompeten pada suatu bidang sehingga diwajibkan untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidang dimaksud;
3. Faktor alam maupun cuaca dapat mempengaruhi tercapainya target capaian indikator kinerja kegiatan;
4. Kurangnya koordinasi secara intens antara tim atau atasan dapat menyebabkan kesalahpahaman target yang harus dicapai atau bagaimana cara mencapainya. Hal ini dapat menghambat kinerja dan mengakibatkan kegagalan mencapai target kinerja;
5. Adanya kebijakan perihal efisiensi anggaran pada kementerian / lembaga sesuai instruksi presiden yang banyak mempengaruhi rencana kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2025.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

### **III. Penutup**

#### **III.1 Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Terealisasi untuk 5 Trayek dalam setahun (Target 5 trayek);
2. Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe-A terealisasi 3 Kegiatan (Target 6 kegiatan);
3. Jumlah Terminal Tipe-A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 1 Unit (Target 1 unit);
4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan Beroperasi untuk mendukung konektivitas Terealisasi Sebesar 5 Unit (Target 5 unit);
5. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 trayek);
6. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 3 Unit (Target 3 unit);
7. Jumlah Terminal Tipe-A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terealisasi Sebesar 1 Unit (Target 1 unit);
8. Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe-A sesuai SPM Terealisasi Sebesar 1 Unit (Target 1 unit);
9. Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM Terealisasi Sebesar 1 Lokasi (Target 1 lokasi);
10. Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM Terealisasi Sebesar 1 Tahun (Target 1 tahun);
11. Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
12. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
13. Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
14. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM terealisasi sebesar 2 Unit (Target 2 Unit);
15. Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebesar 2 Lokasi / Tahun (Target 2 lokasi / Tahun);
16. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM belum dilaksanakan sampai dengan Triwulan II (Target 3 unit);

17. Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebesar 3 Unit (Target 3 unit);
18. Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 unit);
19. Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 3 kegiatan);
20. Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang akan dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
21. Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan terealisasi sebesar 1 Lokasi (Target 1 lokasi);
22. Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
23. Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
24. Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
25. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
26. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman dilaksanakan pada Semester II (Target 6 kegiatan dari bulan Juli sampai dengan Desember);
27. Jumlah Kegiatan terkait Uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebesar 5 Kegiatan pada Semester I dan dilanjutkan sampai dengan Semester II (Target 10 kegiatan);
28. Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis dilaksanakan pada Semester II (Target 10 unit);
29. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat teralisasi sebesar 2 Kegiatan (Target 4 kegiatan);
30. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 Dokumen);
31. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 2 Kegiatan (Target 2 kegiatan);
32. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 2 kegiatan);
33. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebesar 1 Dokumen (Target 2 dokumen);
34. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Dokumen (Target 1 dokumen);
35. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
36. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
37. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan);
38. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebesar 2 Kegiatan (Target 2 kegiatan);
39. Kegiatan mendukung Pembangunan ZI terealisasi sebesar 1 Kegiatan (Target 1 kegiatan);
40. Kegiatan mendukung kebijakan dan reformasi Hukum dilaksanakan pada Semester II (Target 1 kegiatan).



### III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel III. 1** Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5	5	5	100%	TERCAPAI	Akan dilakukan monitoring dan pengawasan rutin terhadap kegiatan angkutan perintis jalan ditiap bulannya.	Seksi Sarana AJSDP
2.	SK3	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi	IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	6	6	3	50%	BELUM TERCAPAI	Melakukan rapat evaluasi dengan operator AKAP secara berkala ditiap bulannya.	Seksi Sarana AJSDP
			IKK 3.2	Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan monitoring dan evaluasi terminal yang beroperasi secara berkala ditiap bulannya	Seksi Prasarana JSDP
3	SK5	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	5	5	5	100%	TERCAPAI	Melakukan monitoring dan evaluasi Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi secara berkala ditiap bulannya	Seksi Prasarana JSDP
			IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Akan dilakukan monitoring dan pengawasan rutin terhadap kegiatan angkutan perintis penyeberangan ditiap bulannya )	Seksi Sarana AJSDP
4	SK6	Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau	IKK 7	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	3	3	100%	TERCAPAI	Melakukan monitoring dan evaluasi Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi secara berkala ditiap bulannya	Seksi Prasarana JSDP
5	SK7	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi	IKK 7.1	Jumlah Terminal Tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi kesesuaian SPM di terminal tipe A	Seksi Prasarana JSDP

**BPTD KELAS II BALI**  
**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		Jalan	IKK7.2	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	Unit	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terkait operasional layanan di terminal tipe A terhadap SPM	Seksi Prasarana JSDP
			IKK7.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi kesesuaian SPM di UPPKB	Seksi Prasarana JSDP
			IKK7.4	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM	Tahun	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terkait operasional layanan di UPPKB terhadap SPM	Seksi Prasarana JSDP
			IKK7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi kinerja berkala terkait tugas pokok pelayanan	Seksi Prasarana JSDP
			IKK7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan monitoring dan evaluasi pra maupun pasca event	Seksi LLJSDPP
			IKK7.7	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan monitoring penyusunan dan pemanfaatan dokumen teknis	Seksi Prasarana JSDP
6	SK8	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi ASDP	IKK8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	2	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi kesesuaian SPM di Pelabuhan Penyeberangan	Seksi Prasarana JSDP
			IKK8.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Tahun	2	2	2	100%	TERCAPAI	Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terkait operasional layanan di Pelabuhan Penyeberangan terhadap SPM	Seksi Prasarana JSDP
			IKK8.3	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	3	3	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi kesesuaian SPM di Pelabuhan Sungai dan Danau	Seksi Prasarana JSDP
			IKK8.4	Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	3	3	3	100%	TERCAPAI	Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terkait operasional layanan di Pelabuhan Sungai dan Danau terhadap SPM	Seksi Prasarana JSDP
			IKK8.6	Operasional dan Pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi terkait fungsi pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Seksi Prasarana JSDP

**BPTD KELAS II BALI**  
**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
7	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3	3	1	33%	BELUM TERCAPAI	Melakukan Evaluasi rutin terhadap hasil pengawasan untuk mengetahui efektivitas dan memperbaiki yang kurang optimal	Seksi LLJSDPP
			IKK9.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan Evaluasi capaian dan efektivitas kegiatan pengawasan untuk perbaikan program ke depan	Seksi LLJSDPP
			IKK9.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan Evaluasi rutin terhadap efektivitas fasilitas penimbangan dalam mendukung keselamatan dan pemeliharaan jalan.	Seksi Prasarana JSDP
			IKK9.4	Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel Karoseri	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan Pelaporan dan evaluasi berkala kegiatan pengawasan, termasuk indikator jumlah bengkel yang diperiksa dan jenis pelanggaran yang ditemukan	Seksi LLJSDPP
			IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan monitoring dan evaluasi perihal MRLL dan Andalalin setiap bulannya	Seksi LLJSDPP
			IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi pengadaan perlengkapan jalan setiap bulannya	Seksi LLJSDPP
			IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan Evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan	Seksi LLJSDPP
8	SK10	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	6	6	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi perihal kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun setiap bulannya	Seksi Sarana AJSDP
			IKK10.2	Jumlah Kegiatan terkait uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	10	10	5	50	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi terkait Uji Kalibrasi alat uji berkala di daerah	Seksi Sarana AJSDP
9	SK 11	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	10	10	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan setiap bulannya	Seksi LLJSDPP

**BPTD KELAS II BALI**  
**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
10	SK4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	4	4	2	50%	BELUM TERCAPAI	Melakukan koordinasi dan evaluasi perihal penyusunan pagu anggaran	Subbagian Tata Usaha
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	2	2	100%	TERCAPAI	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait maturitas SPIP	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	2	2	1	50%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi terkait peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	2	1	50%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil rekomendasi audit/pemeriksaan	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi perihal pengelolaan aset	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti pengaduan yang ada pada SP4N LAPOR	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi digitalisasi arsip dokumen	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan evaluasi secara berkala terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	2	2	2	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi perihal pengembangan SDM Unit Kerja	Subbagian Tata Usaha
			IKK4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1	1	1	100%	TERCAPAI	Melakukan evaluasi dan monitoring pembangunan Zona Integritas (ZI)	Subbagian Tata Usaha

**BPTD KELAS II BALI**  
**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK4.12	Kegiatan mendukung kebijakan dan Reformasi Hukum	Kegiatan	1	1	0	0%	BELUM TERCAPAI	Melakukan monitoring dan evaluasi perihal kebijakan dan reformasi hukum	Subbagian Tata Usaha

**Daftar Lampiran**

**Lampiran 1**



**Lampiran 7**



**Lampiran 2**



**Lampiran 8**



**Lampiran 3**



**Lampiran 9**



**Lampiran 4**



**Lampiran 10**



**Lampiran 5**



**Lampiran 11**



**Lampiran 6**



**Lampiran 12**



**Lampiran 13**



**Lampiran 19**



**Lampiran 14**



**Lampiran 20**



**Lampiran 15**



**Lampiran 21**



**Lampiran 16**



**Lampiran 22**



**Lampiran 17**



**Lampiran 23**



**Lampiran 18**



**Lampiran 24**



**Lampiran 25**



**Lampiran 31**



**Lampiran 26**



**Lampiran 32**



**Lampiran 27**



**Lampiran 33**



**Lampiran 28**



**Lampiran 34**



**Lampiran 29**



**Lampiran 35**



**Lampiran 30**



**Lampiran 36**





**Lampiran 37**



**Lampiran 43**



**Lampiran 38**



**Lampiran 44**



**Lampiran 39**



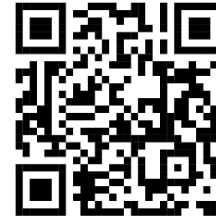
**Lampiran 45**



**Lampiran 40**



**Lampiran 46**



**Lampiran 41**



**Lampiran 47**



**Lampiran 42**



**Lampiran 48**



**Lampiran 49**



**Lampiran 51**



**Lampiran 50**



**Lampiran 52**





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT